

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian merupakan bagian terpenting untuk mengkaji teori-teori yang digunakan dalam menunjang penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian. Landasan teori meliputi teori serta konsep yang dapat dijadikan dasar untuk pembuatan sintesis (kesimpulan) beserta indikator-indikator yang dituliskan pada bagian akhir dari sebuah penelitian. Sintesis tersebut pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan definisi konseptual.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penelitian ini menggunakan Kebijakan Pertahanan Nasional, Tujuan dan Kepentingan Nasional, Strategi Pertahanan Indonesia, Ketahanan Nasional, dan Keamanan Nasional sebagai *grand theory*. Teori Ekonomi Pertahanan sebagai *middle range theory*. Teori Anggaran Pertahanan, Pengeluaran Pemerintah, Postur APBN, Teori Produk Domestik Bruto Dan Teori Pertumbuhan Ekonomi sebagai *applied theory*;

2.1.1 *Grand Theory*

Grand theory adalah teori utama atau teori makro yang terhubung terhadap keseluruhan teori dan variabel dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil Kebijakan Pertahanan Nasional, Tujuan dan Kepentingan Nasional dan Strategi Pertahanan Indonesia, Ketahanan Nasional dan Keamanan Nasional sebagai *grand theory*.

2.1.1.1 Kebijakan Pertahanan Indonesia (*Indonesia Defency Policy*)

Dalam rangka terwujudnya tujuan dan sasaran strategis pertahanan, perlu untuk dirumuskan kebijakan pertahanan negara sebagai acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan sistem pertahanan negara yang meliputi segala upaya untuk membangun,

memelihara serta mengembangkan secara terpadu dan terarah segenap komponen (Supandi, 2019). Kebijakan pertahanan bertujuan untuk mengarahkan tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya mencegah dan menghadapi ancaman, tantangan, hambatan atau gangguan dari negara atau pihak lain sehingga seluruh komponen bangsa dapat melakukan kegiatan tanpa tekanan (Yusgiantoro, 2014).

Kebijakan pertahanan mengidentifikasi ancaman berdasarkan pada analisis intelijen dan berbagi sumber informasi yang akurat untuk menentukan cakupan tindakan militer dalam mewujudkan keamanan nasional, aliansi pertahanan, kesiapan tempur, organisasi militer kekuatan nasional, dan penggunaan teknologi militer. Kebijakan pertahanan nasional juga menetapkan strategi pertahanan nasional, kapan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan kekuatan bersenjata nasional, bagaimana postur strategis pertahanan nasional untuk mengatasi ancaman wilayah dan menentukan pilihan yang ada untuk menghadapi ancaman.

Kebijakan pertahanan merupakan mekanisme politik, manajemen, finansial, administratif yang dapat dilaksanakan dan disiapkan untuk tujuan dan sasaran militer yang eksplisit. Salah satu cara pembuatan kebijakan pertahanan yaitu dengan melakukan kajian (*assessment*) yang komprehensif berdasarkan analisis manfaat biaya (*benefit-cost analysis*). Kebijakan pertahanan dirumuskan melalui proses perencanaan pertahanan untuk membuat keputusan organisasi yang penting, termasuk mengidentifikasi prioritas dan alternatif yang berbeda dan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh serta dampak yang ditimbulkan diantara prioritas dan alternatif yang tersedia. Dalam merumuskan kebijakan pertahanan Indonesia, perlu memperhatikan visi, misi dan tujuan pembangunan nasional yang di dalamnya sudah terintegrasi berbagai aspek kehidupan nasional dan dijabarkan atau diturunkan untuk sektor pertahanan serta perumusan kebijakan pertahanan dapat dikembangkan dari sisi lain dengan memperhatikan kecenderungan lingkungan strategis, lingkungan tetap serta situasi dan

kondisi pertahanan (pendekatan deduktif dari aspek mikro) (Yusgiantoro, 2014).

Kebijakan pertahanan negara mengacu kepada visi dan misi pemerintah dan diwujudkan secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Guna mewujudkan visi-misi tersebut, maka dirumuskan strategi pertahanan negara yang mencakup tujuan, sasaran strategis, cara mencapai sasaran dan sumber daya pertahanan dalam rangka mewujudkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang tangguh, efektif, dan berdaya tangkal tinggi. Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional. Kebijakan pertahanan negara Indonesia tahun ke tahun merupakan tindak lanjut dari upaya pencapaian sasaran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pertahanan Negara tahun sebelumnya.

Dalam implementasinya, maka dilakukan melalui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mengatasi berbagai bentuk ancaman. Kebijakan ini dikembangkan dengan tetap berpedoman kepada visi, misi Pemerintahan dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi dan misi dalam pembangunan pertahanan Negara dimana adapun visi-misi pertahanan negara yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang dijabarkan melalui (Kebijakan Pertahanan Negara, 2021):

- 1) Terjaganya kedaulatan negara di wilayah darat, laut dan udara juga daerah perbatasan dan terlindunginya keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman secara langsung dan tidak langsung, dalam dan luar negeri. Hal ini sebagai upaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misis ini diwujudkan dengan membangun kewaspadaan dini dalam mengantisipasi, mencegah menangkal, dan memindak segala

bentuk ancaman. Selain itu dalam upaya pencegahan, diperlukan peningkatan kerjasama antara lembaga intelijen untuk pertahanan.

- 2) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 3) Terintegrasinya pertahanan militer dan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta.
- 4) Postur TNI yang tangguh dalam mengatasi ancaman. Hal ini dapat diwujudkan dengan upaya-upaya seperti: pemenuhan kekuatan pokok , pengembangan personel TNI dengan menerapkan prinsip kebijakan *right sizing* dan *proportional growth* sesuai dengan pengembangan satuan TNI, penguatan kapasitas lembaga intelijen untuk pertahanan negara, latihan gabungan TNI untuk meningkatkan kemampuan *interoperability* yang didukung satu sistem *network centric warfare* dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk menghadapi modern, dsb
- 5) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya membangun kemampuan pertahanan dan profesionalisasi TNI, memperkuat industri pertahanan, menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri. Hal ini tercermin dengan meningkatnya diplomasi pertahanan melalui kerjasama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan. Penguatan kerjasama baik dengan negara ASEAN, kawasan Pasifik Selatan dan negara-negara sahabat lainnya.
- 6) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing yang tercermin dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat Indonesia yang maju, dan sejahtera, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum dan berkepribadian dalam kebudayaan.
- 7) Terwujudnya kesadaran bela negara bagi seluruh warga negara

- 8) Terwujudnya industri pertahanan nasional yang kuat, mandiri, dan berdaya asing guna mendukung kebutuhan pertahanan negara

2.1.1.2 Kepentingan Pertahanan Nasional (*National Interest*) dan Tujuan Pertahanan Nasional (*National Objectives*)

Pertahanan negara pada dasarnya digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan guna mencapai tujuan nasional.

Menurut Llyod–Lorenzini dalam Setiadji (2020) pada teori perencanaan kekuatan (*force planning*) menyatakan bahwa dalam pembangunan postur atau kekuatan pertahanan tidak lepas dari aspek kepentingan nasional yang juga dirumuskan dalam tujuan nasional (*national objectives*). Kepentingan Nasional (*National Interest*) mengacu pada bahasa Prancis '*raison d'Etat*' atau dalam bahasa Inggris "*Reason of the State*" yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alasan utama eksistensi negara. Pengertian kepentingan nasional juga berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara beserta ambisi yang terkandung didalamnya meliputi aspek ekonomi, militer, budaya dsb. Hal ini serupa dengan dikemukakan oleh Nicholas Spykman seorang pakar geostrategis dimana terbentuknya suatu negara (*nation state*) akan dilanjutkan dengan perumusan kepentingan nasional sehingga tanpa negara maka kehadiran kepentingan nasional akan nihil.

Kepentingan nasional berkembang menjadi sangat beragam namun yang paling utama adalah eksistensi dan kelangsungan hidup negara, kesejahteraan rakyat dan keamanan nasional. Aspek lain yang penting adalah upaya menanggapi kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi serta mempertahankan stabilitas serta eksistensi keamanan nasional, melalui kekuatan pertahanan yang memadai. Hakekat

kepentingan nasional memiliki ciri *outward looking* dimana suatu negara memposisikan diri untuk mencapai tujuan nasional, mempertahankan eksistensi, membela hak serta melaksanakan kewajiban dalam hubungan dan interaksi dengan negara lain.

Kepentingan nasional suatu negara harus dirumuskan secara jelas dan tegas oleh pemerintah dan dituangkan dalam suatu produk tertulis yang kemudian dijadikan acuan dalam perumusan strategi besar (*grand strategy*) maupun strategi keamanan nasional di bawahnya yang berisikan sesuatu yang akan dibangun dan dilaksanakan. Dr. Richmond M. Lloyd dalam Setiadji (2020) bahwa "*National interest are the 'Wellspring' from which national objectives and a grand strategy flow. National interest are the most important wants and needs of a nation*". Dari definisi tersebut terlihat bahwa kepentingan nasional akan menjadi sumber penentuan dan perumusan tujuan nasional (*national objectives*) dan strategi besar (*grand strategy*) bahkan sampai kepada penyusunan *national military strategy* maupun *maritime strategy* (untuk negara maritim). Strategi besar (*Grand strategy*) lebih menekankan pada pengarahannya seluruh potensi nasional untuk tujuan pertahanan sedangkan *national strategy* digunakan secara terkoordinasi, seluruh potensi kekeutan nasional untuk mencapai tujuan nasional sehingga dalam hirarki pengambilan keputusan negara, kepentingan nasional menduduki tempat tertinggi. Tanpa adanya kepentingan nasional maka sangat mustahil jika strategi pembangunan dapat terealisasi, dimana strategi pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk juga aspek pertahanan.

Tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan kepentingan nasional Indonesia yang bersifat permanen dan berlaku sepanjang masa. Makna kepentingan pertahanan nasional yang bersifat permanen adalah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI dengan tidak membiarkan setiap jengkal tanah air dikuasai atau diceraiberaikan oleh pihak manapun. Hal ini jelas

tertulis di dalam Buku Putih Kementerian Pertahanan 2015, bahwa *kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional*. Kepentingan nasional juga tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan dalam tiga strata yakni: (1) mutlak, kelangsungan negara kesatuan republik Indonesia berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia, (2) penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras dan golongan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, dan (3) pendukung, berupa keterlibatan Indonesia secara aktif dan meluas dalam perdamaian dunia.

Kepentingan nasional kemudian diturunkan dalam tujuan nasional, lalu dijabarkan dalam strategi pertahanan nasional. Tujuan nasional, sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional memiliki makna sebagai berikut: *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah memberi perlindungan fisik bangsa dan wilayah Indonesia dari ancaman kekuatan yang berasal dari luar serta perlindungan hak-hak setiap warga, komunitas dan wilayah dari kemungkinan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak manapun. Hal ini termasuk rangkaian upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan, keamanan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk

memenuhi hak dasar warga negara. *Ketiga*, terbangunnya sistem pertahanan dan keamanan Rakyat Semesta yang terintegrasi dan modern. *Keempat*, terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk pertahanan negara. *Kelima*, terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan.

Kepentingan nasional Indonesia diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu: ***Pertama***, tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. ***Kedua***, upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara. ***Ketiga***, sarana yang digunakan adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu.

2.1.1.3 Strategi Pertahanan Nasional

Strategi pertahanan adalah cara menggunakan ketersediaan anggaran maupun sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan aspek pertahanan, dan didukung oleh ketersediaan teknologi yang akan membantu mendefinisikan strategi yang mungkin dapat diterapkan dalam mencapai tujuan. Strategi pertahanan disusun dengan memperhatikan 3 elemen dasar penting (Setiadji, 2020), yakni:

- 1) Membentuk; strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional yang mendukung stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik dan agresi serta tindakan kekerasan lainnya,
- 2) Merespon; strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis sehingga mampu meniadakan ancaman dan resiko terhadap kepentingan nasional,
- 3) Menyiapkan; strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti melalui upaya

pembangunan kekuatan, pengembangan konsep dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional.

Persyaratan ketersediaan anggaran dan penggunaannya sangat perlu dilaksanakan secara efisien dan diupayakan agar jumlah manfaat marjinal yang diperoleh sama dengan biaya marjinal dari kebutuhan optimum di bidang pertahanan. Hasil akhir daripada asumsi ini adalah permasalahan keamanan (*secutity*) saling mempengaruhi satu dan lainnya dengan kesejahteraan (*prosperity*)

RUMUS:

$$\text{£MB=MC}$$

Dimana: MB : Marjinal Pertahanan

MC : Biaya marjinal yang dibutuhkan

2.1.1.4 Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan Kepentingan Nasionalnya. Ketahanan Nasional dapat dilihat dari kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang tercermin dalam Astagatra (geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan) dihadapkan kepada berbagai ancaman yang timbul sebagai dampak pengaruh perkembangan lingkungan strategis.

Ketahanan Nasional Indonesia sebagai konsepsi merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945 dan Wawasan Nusantara sebagai perekat semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi terwujudnya kemakmuran yang adil dan merata, baik rohaniah maupun jasmaniah, sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam.

Ketahanan Nasional dapat dilihat dari terwujudnya pencapaian kesejahteraan dan keamanan (*ends*) melalui pengembangan kebijakan (*ways*), dengan menyiapkan potensi secara seimbang, serasi dan selaras menjadi kemampuan nasional yang berisi kekuatan nasional sebagai sarana (*means*), untuk digunakan menghadapi segala bentuk ancaman sebagai dampak dari kondisi dinamis yang terjadi akibat perkembangan lingkungan strategis. Ketahanan nasional juga bersifat sangat kompleks sebab menyangkut kehidupan nasional seperti ideologi, politik, sosial, budaya, teknologi, hukum, pertahanan dan keamanan serta bersifat dinamis dan berubah seiring berjalannya waktu. Tidak kalah penting adalah aspek demografi, sumber kekayaan alam dan geografi Indonesia menjadi bahan pertimbangan tersendiri dalam proses pengembangan kebijakan ketahanan nasional.

2.1.1.5 Keamanan Nasional

Secara etimologis, keamanan berasal dari bahasa Latin, yaitu *securus* “se” dan “cura” yang diartikan dan diterjemahkan sebagai “bebas dari bahaya” “bebas dari ketakutan” (*free from danger, free from fear*). Keamanan nasional (*National Security*) menurut Barry Buzza, Ole Weaver dan Jaap de Wilde melalui dua dimensi yaitu *Classical Security Complex Theory* (CSCT), dan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Dua

dasar pikir dari *national security* yaitu *securization* (sekuritisasi) dan *sectoral analysis* (analisis sektoral). Sekuritisasi didefinisikan dalam pendekatan *radically constructivist* dimana ancaman mempunyai makna *social-threats are socially constructed*. Pendekatan ini dimaksud adalah meskipun secara militer tidak dianggap mengancam keamanan namun jika secara sosial dianggap ancaman keamanan maka yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan *security* (Setiadji, 2020)

Keamanan bukan konteks “objektif” dari “ancaman dan rill” melainkan subjektif. *“security is thus a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a threat.* Kebijakan keamanan nasional adalah keputusan politik dari suatu bangsa yang melembaga untuk melindungi bangsa dan kepentingan bangsa di tingkat nasional maupun internasional, Dalam lingkungan akademik, ruang lingkup keamanan nasional meliputi keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan serta kesejahteraan (Setiadi, 2020). Hal tersebut diupayakan agar terhindar serta menjamin terbebas dari pelanggaran hukum, gangguan tertib sosial, ancaman militer bersenjata dan gangguan yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

Di era globalisasi saat ini, tolak ukur untuk mencapai tujuan nasional seperti memelihara atau membangun postur untuk mencegah, menangkal, dan melawan ancaman yang dihadapi berupa kemampuan yang handal, kekuatan, kompeten dan bertanggung jawan sehingga kekuatan dan keamanan negara berfungsi dengan memperhatikan ancaman yang dihadapi dan perkembangan regional dan global (Anggoro, 2005). Oleh sebab itu, dalam upaya memperkuat pertahanan negara sangat dibutuhkan dukungan anggaran pertahanan, dengan alasan antara lain:

- 1) Krisis dan konflik yang terjadi menyebabkan perlunya penguatan alat pertahanan dan alutsista
- 2) Meningkatkan kemandirian teknologi alutsista

- 3) Dalam rangka menyeimbangi kekuatan negara lain di kawasan
- 4) Upaya peningkatan eksistensi sebaga negara terkuat dalam menjaga kepentingan politik di dunia dan kawasan
- 5) Upaya memperkuat pertahanan dalam rangka stabilitas kawasan

2.1.2 Middle Theory

Middle theory adalah teori-teori yang digunakan untuk menghubungkan antara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empiris dan *grand theory* yang abstrak. Pada penelitian ini menggunakan Teori Ekonomi Pertahanan sebagai *middle range theory*

2.1.2.1 Teori Ekonomi Pertahanan

Dalam perkembangannya, dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia maka kebutuhan terhadap ekonomi pertahanan semakin meningkat. Ekonomi pertahanan saat ini menjadi sangat penting karena pergeseran paradigma keamanan global dari abad ke 20 hingga abad ke 21. Pada abad ke-20, paradigma keamanan global yang menonjol mengacu pada geopolitik, namun setelah perang dingin, semua beralih menjadi geokonomi (Yusgiantoro, 2014). Pada saat itu, penerapan ilmu pertahanan sangat menonjol tetapi tidak mengabaikan kaedah pendekatan ekonomi. Dengan anggaran pembangunan terbatas namun disisi lain sektor pertahanan membutuhkan biaya besar sehingga sektor ekonomi ikut menjadi terbatas. Oleh karena itu, peran ekonomi pertahanan sangat dibutuhkan sebab adanya kehendak untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam seria proses dalam pertahanan.

Dengan memperhatikan berbagai kelangkaan serta keterbatasan sumber daya dalam rangka mempersiapkan gerakan militer (yang bersifat ofensif dan defensif atau bersama-sama, ekonomi pertahanan juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai negara di dunia serta aktor pemerintah/non-pemerintah serta gabungan interaksi diantaranya. Bidang ekonomi pertahanan adalah bidang yang sangat eksplisit membahas

mengenai tingkat belanja pertahanan, dampak pengeluaran terhadap produk dan lapangan kerja di dalam maupun luar negeri, pertimbangan mengenai eksistensi dan besaran lingkup pertahanan, hubungan belanja pertahanan dengan perubahan teknologi dan implikasi belanja pertahanan, dalam rangka kestabilan atau ketidakstabilan keamanan internasional (Intriligator, 1990).

Ekonomi pertahanan baik secara teori maupun praktek selalu berhubungan dengan sistem ekonomi makro dan mikro seperti produk domestik bruto, sedangkan pengeluaran pemerintah pusat di bidang pertahanan atau *Central Government Expenditure* adalah ukuran beban relatif keuangan negara dari sektor pertahanan. Belanja dari sektor pertahanan merupakan bagian dari belanja negara.

Bagaikan dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dan melengkapi, demikian juga aspek ekonomi dan pertahanan. Ekonomi yang maju sudah pasti didukung oleh aspek pertahanan, pertahanan negara mempengaruhi keamanan nasional (*national security*) dan stabilitas perekonomian nasional dan kualitas ekonomi dan kualitas ekonomi pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan (*prosperity*). Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang paling penting dalam menjaga dan membina stabilitas sosial – ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara mempunyai banyak faktor yang sangat signifikan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pembangunan kekuatan pertahanan. Tingkat ekonomi pembangunan di suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan kekuatan.

2.1.3 Applied Theory

Applied theory adalah teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan antara konsep-konsep sebuah penelitian. Teori ini disebut juga teori mikro yang menjadi dasar dalam pencarian indikator-indikator penelitian. Pada penelitian ini menggunakan Teori Anggaran Pertahanan,

Pengeluaran Pemerintah, Postur APBN, Teori Produk Domestik Bruto Dan Teori Pertumbuhan Ekonomi sebagai *applied theory*.

2.1.3.1 Teori Anggaran Pertahanan

Defenisi anggaran pertahanan dewasa ini dianggap sangat beragam dan kompleks namun yang isu-isu utama yang berkaitan dengan belanja pertahanan saling berkaitan satu dengan lainnya dan berkaitan dengan aspek fungsi pertahanan versus pendekatan intitusional dalam menyusun kekuatan pertahanan, biaya langsung maupun biaya *intangibile* serta nilai tambah yang di peroleh dihadapkan dengan perhitungan pembiayaan pertahanan secara umum (Setiadji, 2020). Masing-masing negara memiliki pengertian sendiri mengenai anggaran pertahanan sesuai dengan tujuan, visi dan misi negara. Anggaran pertahanan menurut Kementerian Pertahanan adalah “*suatu rencana pekerjaan keuangan yang disusun secara sistematis yang meliputi jumlah pengeluaran maksimal yang diperlukan untuk membiayai kepentingan negara dalam jangka waktu tertentu dan perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin dapat diterima dalam masa tersebut*” (Supandi, 2020).

Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan *anggaran publik* yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. (Supandi, 2019). Anggaran pertahanan juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja pertahanan yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Besaran angka dalam anggaran belanja pertahanan suatu negara mencerminkan kemampuan suatu negara untuk medanai kegiatan pertahanan. Tujuan dari diadakannya pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia). Hal ini sejalan dengan pendapat oleh pakar Ekonomi, Adam

Smith dimana tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama.

Persyaratan ketersediaan anggaran dan penggunaannya perlu dilaksanakan secara efisien, yang menuntut agar jumlah manfaat marjinal yang diperoleh sama dengan biaya marjinal dari kebutuhan optimum di bidang pertahanan. Pembiayaan pertahanan diperlukan untuk membiayai belanja pertahanan yang memerlukan dana keuangan, baik dari anggaran pemerintah atau dengan kata lain ekuitas (*equity financing*) maupun dari pinjaman (*debt financing*) yang pada akhirnya menjadi beban dari negara (*government balance sheet*). Untuk sistem penganggaran di Indonesia, ekuitas dalam sistem anggaran pemerintah dapat disebutkan dengan kata lain sebagai pembiayaan dengan rupiah murni yang dibiayai langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Yusgiantoro, 2014). Perhatian utama anggaran pertahanan adalah penciptaan, pemeliharaan dan melengkapi angkatan bersenjata untuk melawan dan tujuan dari pengeluaran pertahanan adalah untuk menyediakan pertahanan pertahanan yang kuat bagi negara, warga negara dan beserta teritorinya

Tabel 2.1 Alokasi Anggaran Pertahanan

KET	TAHUN							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BESAR ALOKASI ANGGARAN BELANJA MILITER (Rp)	61.226.856.46 1.850 atau realisasi 83,94 % dari totalrealisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	87.706.685.33 4.602 atau realisasi 15,04 dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	86.185.628.39 0.534 atau 14,93 dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	105.907.340.4 80.828 atau 13,85% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	109.003.928.0 25.00 atau 14,34% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	117.506.617.8 27.295 atau 15,33% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	106.832.343.0 39.117 atau 12,60% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L	115.424.549.1 99.337 atau 12,92% dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L
PERSENTASE ANGGARAN BELANJA PERTAHANAN PADA PDB (%)	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan dan SIPRI (diolah)

Tingginya alokasi anggaran pertahanan dan peningkatan jumlah anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa secara umum keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional. Kebutuhan anggaran pertahanan akan terus meningkat seiring dengan kualitas ancaman yang dihadapi termasuk kebutuhan pemeliharaan dan operasional Alutsista yang semakin modern. Alokasi anggaran akan semakin meningkat seiring dengan perbaikan perekonomian nasional. Pemenuhan anggaran pertahanan negara pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan negara yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek terhadap stabilitas nasional, sehingga berdampak terhadap kelancaran pembangunan nasional. Hingga saat ini, sektor pertahanan masih menjadi prioritas anggaran pemerintah. Anggaran Kementerian Pertahanan juga merupakan yang terbesar dibanding Kementerian/Lembaga lainnya.

Selain untuk program peningkatan profesionalisme prajurit, pendidikan, penelitian dan riset, anggaran pertahanan digunakan untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan (ALUTSISTA) agar tidak tertinggal dengan negara lainnya. Namun, seperti yang diketahui, kenaikan anggaran pertahanan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dinilai tidak berjalan beriringan dengan perbaikan dan peningkatan pengadaan alat utama sistem senjata. Dalam rangka optimalisasi anggaran, masalah utama belanja pertahanan adalah keterbatasan anggaran negara kemudian disusul oleh pengambilan keputusan apakah prioritas yang akan dipilih oleh pemerintah apakah aspek kesejahteraan atau aspek pertahanan.

Hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran pertahanan akan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Salah satu persyaratan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat. Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam perhitungan dan perencanaan

belanja pertahanan adalah tekanan inflasi dalam tahun berjalan yang akan mempersulit pada akhirnya. Kendati demikian, terdapat beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum menyatakan setuju untuk meningkatkan anggaran pertahanan. *Pertama*, kondisi keuangan pemerintah yang terbatas. Situasi ini memberatkan keuangan Negara sehingga peningkatan anggaran pertahanan sulit untuk direalisasikan karena keterbatasan dana. *Kedua*, peningkatan anggaran pertahanan bisa menjadi kontra-produktif dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Adapun kebijakan untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran pertahanan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Salah satu persyaratan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi dan jumlah tabungan swasta dan masyarakat.

Dalam penyusunan anggaran pertahanan kerap kali ditemukan tantangan yang sering ditemukan baik dalam penyusunan, perhitungan dan penetapan anggaran belanja termasuk didalamnya anggaran pertahanan adalah tekanan inflasi dalam tahun berjalan. Untuk masing-masing negara yang menjadi persoalan mengenai anggaran belanja pertahanan adalah tingkat relatif PDB yang berbeda dengan negara lain karena anggaran belanja pertahanan suatu negara umumnya memuat sektor pembiayaan yang berbeda dengan negara lain. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti AS, Cina, Rusia, Perancis dan Inggris memiliki pengeluaran pertahanan yang cukup besar dari anggaran pemerintah bahkan di luar anggaran yang wajib disediakan untuk membayar gaji pegawai dan pembayaran utang negara.

Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah dinamika perekonomian global menjadi fenomena yang menentukan dalam pembangunan kekuatan militer. Perlambatan pemulihan ekonomi global dalam beberapa empat tahun terakhir berpengaruh besar pada penurunan nilai total anggaran belanja pertahanan global. Pada tahun 2015 jumlah

total anggaran seluruh dunia diperkirakan mencapai 1.676 miliar dollar AS turun sebesar 1% dibandingkan tahun 2014. Jumlah ini setara 2,3% *Gross Domestic Product* (GDP) dunia pada tahun yang sama. Kecenderungan penerunan anggaran pertahanan telah berlangsung selama 4 tahun sejak tahun 2011 (Freeman, 2016).

Secara keseluruhan, tren kenaikan anggaran pertahanan di tengah situasi pertumbuhan ekonomi global yang tidak menentu akan menunjukkan arah kebijakan strategis negara-negara kekuatan utama regional dan global. Pengembangan dan akuisisi senjata strategis diperkirakan akan menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan anggaran pertahanan khususnya di negara tertentu yang sangat asertif dalam kebijakan pembangunan kekuatan militernya. Penurunan anggaran pertahanan di sejumlah negara tertentu pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian anggaran dan tidak merepresentasikan menurunnya keinginan untuk pembangunan kekuatan. Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, kebutuhan untuk pengembangan kekuatan militer akan semakin meningkat.

2.1.3.2 Teori Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*)

Teori pengeluaran pemerintah memiliki dua jenis teori pendukung yaitu teori mikro pengeluaran pemerintah dan teori makro pengeluaran pemerintah. Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersediannya barang publik. Pada teori makro, terdapat model pengeluaran pemerintah yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Model ini menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal

perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001, 178).

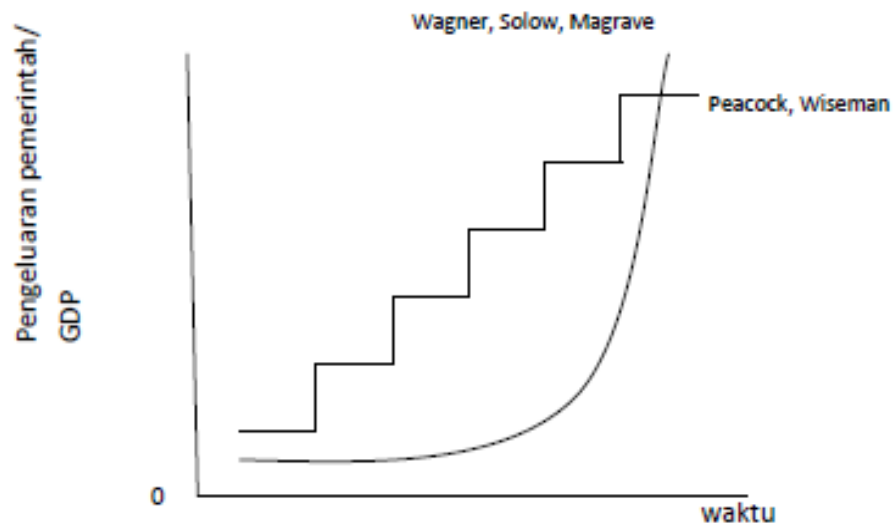
Pengeluaran pemerintah/*Government expenditure*, dalam konteks ekonomi makro adalah salah satu dari berbagai variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sector bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Jika dirumuskan secara matematis maka (Dumairy, 2006):

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya (Dumairy, 2006).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002). Menurut Wagner, pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Inti daripada teori Wagner yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Teori Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila

pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Mangkoesebroto, 2001).



Gambar 2.1 Kurva Teori Wagner

Berdasarkan pada teori Wagner mengemukakan bahwa jika dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, dan sebagainya

2.1.3.3 Postur APBN

Anggaran pada dasarnya adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku pada jangka waktu tertentu (Supandi,2020). Postur APBN meliputi komponen anggaran pemerintah yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan. Pendapatan negara dan hibah terdiri dari penerimaan dalam negeri seperti pajak dan penerimaan bukan pajak, dan hibah, sedangkan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri.

Belanja Negara sangat penting untuk kehidupan masyarakat, maka penyerapan anggaran belanja negara diharapkan dilaksanakan dengan cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dan lambat menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat dan fungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal terutama untuk stimulus perekonomian menjadi tidak efektif.

Pemerintah dalam melaksanakan APBN sebagai amanat rakyat, tentunya harus dikelola dengan tata kelola yang baik (*good governance*) agar keluaran/output yang dihasilkan atas program-program yang dituangkan dalam APBN tersebut dapat secara nyata dan optimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketercapaian *output* tersebut tentunya harus didukung oleh regulasi, proses bisnis, dan sistem pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) secara terkendali, terarah, dan terukur.

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci ke dalam 11 fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial. Berbicara mengenai anggaran di berbagai Kementerian/Lembaga, maka sudah tentu terjadi perubahan terhadap nominal anggaran di setiap tahunnya., Proses pengalokasian anggaran di negara demokrasi melibatkan persetujuan parlemen sebab dana yang akan dipakai adalah semua dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Pengalokasi angagran direncanakan dan dilaksanakan secara proses yang terbuka dan melibatkan partisipasi oleh berbagai pihak dengan tujuan dana yang nanti digunakan tepat sasaran dan mencegah ketidak-efisienan (Yusgiantoro, 2014).

Terdapat tiga jenis anggaran pemerintah, yaitu anggaran berimbang (pendapatan dan pengeluaran pemerintah sama), anggaran surplus (pendapatan yang dantisipasi melebihi pengeluaran), dan anggaran defisit (pengeluaran lebih besar daripada pendapatan). Pendapatan pemerintah berasal dari pajak, penerimaan bukan pajak hibah dan pinjaman. Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa saat ini, pengeluaran investasi dan pembayaran pinjaman kembali. Di Indonesia, sisi pengeluaran dalam anggaran pemerintah dialokasikan salah satunya untuk sektor pertahanan dengan penanggung jawab anggaran pada Kementerian Pertahanan yang terdiri dari belanja pegawai untuk pembayaran gaji personil, belanja barang untuk perawatan dan pemeliharaan serta belanja modal untuk modernisasi atau pembelian alutsista (Yusgiantoro,2014). Pada prinsipnya, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan kekuatan pertahanan memberikan kontribusi pada pengeluaran pemerintah (*Government expenditure/G*).

Di Indonesia hal-hal mengenai APBN terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 yaitu:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara setiap tahun dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
- 3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja tahun yang lalu.

Dalam tata cara penyusunan anggaran, menjelang tahun awal tahun anggaran pemerintah menetapkan dokumen-dokumen APBN yang akan

dapat digunakan setelah disahkan oleh parlemen dan disetujui oleh kepala pemerintah tetapi yang perlu digaris-bawahi adalah dokumen ini dipublikasikan oleh kementerian keuangan. Isi daripada dokumen adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran negara untuk tahun anggaran yang berlaku. Mekanisme pembahasan anggaran pemerintah sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan Undang-undang APBN setiap tahun, diawali pembicaraan pendahuluan antara parlemen dengan otoritas keuangan, otoritas perencanaan dan bank sentral (Yusgiantoro, 2014). Melalui pembahasan tersebut yang dilakukan secara terperinci, maka dapat ditentukan perkiraan besaran pendapatan negara dari sektor pajak dan non-pajak.

Terdapat tiga tahap utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan APBN seperti perencanaan, pelaksanaan dan pemeriksaan. Perencanaan anggaran mengacu pada Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan kemudian diturunkan berupa Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas adalah program jangka menengah dan berlaku dalam 5 tahun dan diturunkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repelita). Proses perencanaan anggaran memakan waktu 6 bulan dimana pada bulan Januari, Menteri Keuangan akan mengirimkan Surat Edaran ke seluruh departemen berupa Daftar Usulan Proyek/Kegiatan. Lalu pada bulan Mei, Pemerintah Pusat menyampaikan pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kepada DPR. Memasuki bulan Agustus, pemerintah pusat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) dan disertai dengan nota keuangan dan dokumen pendukung. Bersama Pemerintah, DPR kemudian membahas RAPBN yang telah diajukan pemerintah sebelumnya dan RAPBN disahkan menjadi APBN selambat-lambatnya dua bulan atau pada bulan Oktober. Ketika APBN disahkan, maka daftar usulan Proyek/Kegiatan menjadi Daftar Isian Proyek/Kegiatan dan kemudian akan dipergunaan oleh Bendahara Departemen dan dicairkan oleh kementerian keuangan.

APBN yang ditetapkan tiap tahun dengan undang undang mempunyai arti bahwa terdapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat atas rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah. APBN yang diusulkan pemerintah pada dasarnya adalah *machtiging* bukan hanya sebagai *consent* dari DPR kepada presiden. *Machtiging* berarti menghendaki pertanggungjawaban pengelolaan APBN oleh presiden kepada pemberi mandate yaitu DPR (Atmadja, 2009)

Pelaksanaan APBN secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pelaksanaan APBN disamping sebagai pembiayaan operasional pemerintahan juga mempunyai implikasi penting terhadap perekonomian negara, mengingat fungsi APBN adalah sebagai system kebijakan fiskal negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Negara dan merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

2.1.3.4 Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional

Pengukuran jumlah produk berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dari proses produksi pada sektor-sektor ekonomi di wilayah suatu negara menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau dikenal dengan *Gross Domestic Product* (GDP). PDB merupakan salah satu dari kategori variabel ekonomi yang sangat diperhatikan dalam perekonomian di suatu negara sebab melalui PDB maka dapat dinilai perhitungan terbaik terkait kesejahteraan di masyarakat. Melalui PDB maka dapat diukur beberapa hal pada waktu bersamaan seperti total pendapatan masyarakat dalam suatu perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian.

PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara tertentu

dalam periode tertentu, dimana jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. Perhitungan PDB dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu cara seperti menambahkan semua pengeluaran rumah tangga atau menambahkan semua pendapatan (upah, sewa, serta keuntungan) yang harus dibayar/dikeluarkan.

Produk Domestik Bruto (PDB) secara mekanismenya adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara, sedangkan PDB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya alam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi pada perhitungan PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan). Terdapat 17 sektor PDB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya, (17) jasa lainnya.

2) Pendekatan Pengeluaran

Adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi. Pendekatan ini paling sering digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila menggunakan pendekatan ini, Produk Domestik Bruto dihitung berdasarkan dengan beberapa sektor seperti: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, (2) pengeluaran konsumsi LNPR, (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, (6) ekspor barang dan jasa, (7) impor barang dan jasa.

3) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud diantaranya upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan yang dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDB juga mencakup penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi).

Penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDB dengan berdasarkan argumen seperti (Yusgiantoro, 2014):

- 1) PDB menghitung total produksi suatu negara dengan memakai faktor produksi dalam negeri dengan kata lain PDB mencerminkan kegiatan ekonomi suatu negara

- 2) Meningkatnya PDB adalah suatu cerminan peningkatan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi karena PDB merupakan jumlah darisemua nilai tambah kegiatan produksi dalam perekonomian
- 3) PDB digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi karena menggunakan konsep aliran (flow concept) dalam suatu negara, yang hanya memperhitungkan nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya
- 4) Indikator PDB digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah suatu negara dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan ekonomi di suatu negara.

RUMUS PDB :

$$\text{PDB Y} = \text{C} + \text{G} + \text{I} + (\text{X}-\text{M})$$

Dimana:

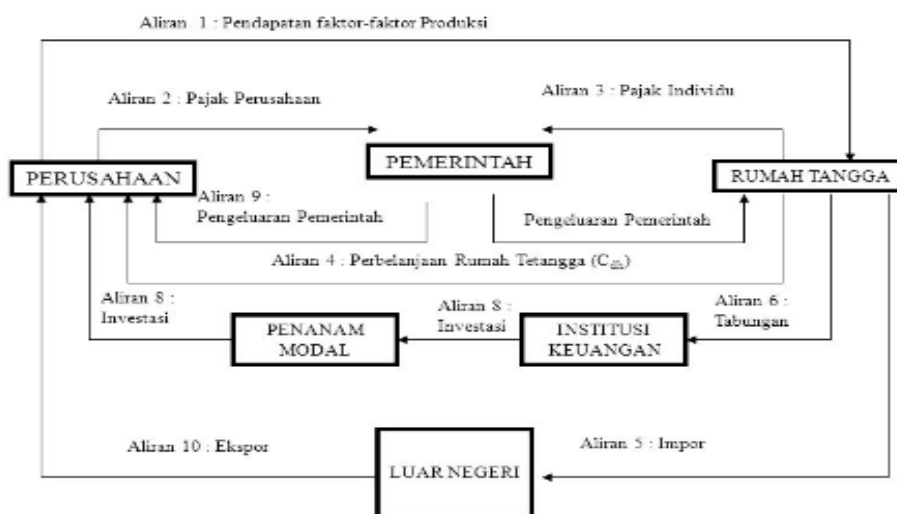
PDB Y	= Produk Domestik Bruto
C	= Konsumsi Masyarakat
G	= Pengeluaran Pemerintah
I	= Investasi
X	= Ekspor
M	= Impor

Dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, pemerintah melakukan kegiatan pengeluaran untuk membiayai semua aktivitasnya. Dana pengeluaran pemerintah tersebut dapat dipenuhi dari pendapatan nasional. Salah satu indikator alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasa disebut dengan pendapatan nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada periode tertentu. Pendapatan nasional/negara adalah dana yang diperoleh pemerintah yang berasal dari berbagai sumber, baik dalam bentuk penerimaan maupun hutang, dan digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran dan belanja pemerintah. Secara harafiah, prinsip daripada pendapatan nasional mewakili konsep Produk Domestik Bruto (*Gross domestic Product/GDP*). Secara konsep,

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur nilai hasil produksi, pendapatan, dan atau pengeluaran nasional suatu perekonomian (Kusnendi, 2002).

Melalui PDB maka dapat diukur beberapa hal pada waktu bersamaan seperti total pendapatan masyarakat dalam suatu perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. Besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal sebenarnya efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal dan uang) yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Jika pendapatan nasional semakin besar maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya perekonomian suatu negara.

SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN DALAM PEREKONOMIAN TERBUKA



Gambar 2.2 Diagram Siklus Pendapatan Nasional 4 Sektor (Circular Flow) Dalam Perekonomian Terbuka

Sumber: Pengantar Ekonomi Makro

Penerimaan pemerintah dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari pihak swasta (perusahaan atau rumah tangga), dan dapat pula berasal dari tingkat pemerintahan lainnya. Angka pendapatan per kapita yang semakin besar maka tingkat kemakmuran semakin tinggi. Besaran

jumlah pendapatan nasional adalah gambaran awal mengenai produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara yang dapat diukur melalui total pendapatan nasional per kapita

Diagram diatas adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi dalam menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan (*utility*) masing-masing pelaku ekonomi. Terdapat empat sektor yang mempengaruhi perekonomian terbuka yaitu sektor rumah tangga (*household sector*), sektor perusahaan (*firms sector*), sektor pemerintah (*government sector*) dan sektor luar negeri (*foreign sector*).

1) Sektor rumah tangga (*household sector*)

Teori konsumsi oleh JM.Keynes mengatakan bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposibel. Terdapat batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan dimana tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi meskipun pendapatan sama dengan nol (konsumsi otonomus). Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yakni pertama penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. Kedua, adanya kecenderungan mengkonsumsi Marginal (*Marginal Propensity to Consume*) – penambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan sebesar satu satuan. Besarnya MPC adalah antara nol dan satu. Dalam perekonomian sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar yang dapat dilihat dari sumbangan konsumsi rumah tangga pada pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Menurut Tadoro, defenisi konsumsi secara umum yaitu sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Hal sama denga Sukirno (2013) berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga adalah niali pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Konsumsi rumah tangga akan terkait dengan tinggi rendahnya pendapatan yang

dicapai. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula pola konsumsinya. Sejalan dengan pernyataan tersebut ketika pendapatan rumah tangga naik peluang untuk menabung juga semakin tinggi. Sektor rumah tangga memiliki faktor produksi alam proses produksi barang dan jasa privat milik sektor perusahaan maupun barang dan jasa publik atau sektor pemerintah. Pada garis 1 (gambar 2.2) adalah aliran pendapatan bagi sektor rumah tangga berasal dari sektor perusahaan dimana, faktor produksi yang dimaksud antara lain tenaga kerja, barang modal/tanah, uang dan kesediaan untuk menanggung resiko yang dihadai oleh perusahaan dengan membeli saham. Sektor perusahaan memberi gaji/upah kepada tenaga kerja, pendapatan bunga untuk meminjam uang, pendapatan sewa untuk kesediaan menanggung resiko. Sektor rumah tangga juga memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah berupa pendapatan upah dan pendapatan bunga dan pendapatan non-balas jasa/PNBJ atau *transfer payment* namun pada umumnya terdapat pada negara maju yang berupa tunjangan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan penangguran.

2) Sektor Perusahaan

Pada garis 4 (gambar 2.2), dimuat aliran pendapatan sektor perusahaan dimana perusahaan memperoleh pendapatan dari sektor pemerintah (garis 5) yang merupakan konsumsi pemerintah, dan dari permintaan sektor luar negeri yang merupakan sektor perusahaan (garis 7). Selain melakukan pembayaran untuk sektor rumah tangga (garis 1) perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah (garis 6)

3) Sektor Pemerintah

Fungsi utama pemerintah dalam menyediakan barang publik (*public goods provision*) dimana dalam menjalankan fungsinya pemerintah melakukan pengeluaran berupa pembelian barang dan jasa dari sektor perusahaan (garis 5) dan pengeluaran untuk sektor rumah tangga

(garis 2). Tidak semua barang publik dapat disediakan sepenuhnya melalui mekanisme pasar sehingga pemerintah menarik pajak dari sektor rumah tangga (garis 3) dan sektor perusahaan (garis 6).

Pemerintah akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar kegiatan operasional dan roda perekonomian tetap berjalan. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran dimana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya seperti pembelian pemerintah atas barang-barang dan jasa-jasa, gaji pegawai negeri dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah adalah suatu cerminan dari pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah.

a. Teori Pengeluaran Pemerintah oleh Hukum *Wagner*

Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relative pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat.

4) Sektor Luar Negeri

Sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah merupakan perekonomian domestik. Interaksi dengan sektor luar negeri dalam perekonomian terbuka (open economy) disederhanakan dengan mekanisme ekspor (garis 7) dan impor (garis 8). Ekspor merupakan aliran pendapatan dari sektor luar negeri kepada perekonomian domestik, sedangkan impor merupakan aliran dari perekonomian domestik ke luar negeri.

Dalam perhitungan output nasional dengan metode pendapatan dijelaskan bahwa Pendapatan Nasional (PN) adalah balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN ke PNN harus mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung dan menambahkan angka subsidi.

Berbicara pendapatan nasional, terdapat persoalan yang masih saja ditemukan oleh beberapa negara terutama negara dunia ketiga yaitu mengenai kemakmuran masyarakat yang tidak hanya diukur pada

pendapatan nasional namun bagaimana pendapatan nasional tersebut didistribusikan secara merata sempurna atau timpang. Persoalan ketimpangan pendapatan nasional adalah masalah keadilan, jika didistribusikan secara merata maka dianggap adil. Pendistribusian yang adil adalah ketika setiap individu memperoleh bagian yang sama dari output perekonomian, dan dianggap tidak adil jika sebagian besar output nasional hanya diperoleh beberapa masyarakat saja

2.1.3.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu negara. Suatu negara dapat dikategorikan maju jika memiliki pendapatan yang meningkatkan, indeks pembangunan yang tinggi, kualitas hidup masyarakat yang terjamin, pembangunan infrastruktur yang memadai, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil (Supandi, 2019).

Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi negara tersebut, yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam satu tahun (BPS, 2018). Perekonomian akan mengalami pertumbuhan jika nilai nyata produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada nilai nyata produksi pada tahun yang sebelumnya. Definisi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2013) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Adam Smith adalah pelopor pembangunan ekonomi dan kebijakan *Laissez-Faire* dan juga merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Smith (Jhingan, 2004) proses pertumbuhan bersifat menggumpal (kumulatif) dimana kemakmuran di suatu negara adalah sebagai akibat

kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan menarik kepemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya jumlah penduduk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan keuntungan secara terus-menerus (Situasi Progresif). Dalam keadaan yang maju seperti ini, sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh miskin menjadi kelompok yang paling bahagia dan nyaman. Namun, kelangkaan sumber daya terjadi pada akhirnya memberhentikan pertumbuhan. Disisi lain, Harrod-Domar berpendapat bahwa setiap perekonomian, menumbuhkan perekonomian tersebut diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal yang dikenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincoln, 2004)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kegiatan ekonomi dalam rangka menghasilkan tambahan pendapatan pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari persentase perubahan PDB harga konstan dengan formulasi (rumus):

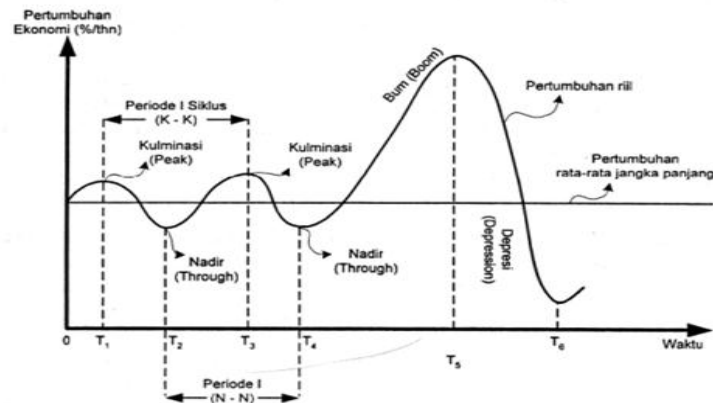
$$\mathbf{PERTUMBUHAN\ EKONOMI} = \frac{PDB(t) - PDB(t-1)}{PDB(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

PDB(t) = PDB riil harga tahun dasar pada tahun t

PDB (t-1) = PDB riil harga tahun dasar pada tahun sebelumnya

Siklus Ekonomi Dengan Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 2.3 Diagram Siklus Ekonomi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Pengantar Ekonomi Makro

Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik-turun aktivitas ekonomi yang terdiri dari empat elemen, yakni:

1) Gerakan menaik (*upturn atau expansion*)

Fenomena pada *upturn* adalah pemulihan ekonomi (*recovery*) ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik (*upturn*). Gerakan menaik disebut ekspansi (*expansion*) bila gerakan menaik terjadi dua triwulan berturut-turut.

2) Titik Kulminasi (*Peak*)

Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya; ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik disebut titik puncak atau kulminasi (*peak*). Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali.

3) Gerakan Menurun (*Downturn*)

Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang kadang disebut dengan resesi (*recession*) bila terjadi selama minimal dua triwulan berturut-turut.

4) Titik Nadir (*Through*)

Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut dengan titik nadir (*through*). Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik.

Yang harus diperhatikan dalam siklus ekonomi pada diagram adalah gerakan gelombang yakni:

1) Gerakan satu siklus, dimana gerakan dari satu titik kulminasi ke satu titik kulminasi yang lain (K-K) atau dari satu titik nadir sampai ke satu titik nadir lain (N-N). Dalam Gambar diagram 2.1, menunjukkan bahwa gerakan K-K berada dalam interval periode waktu T_1-T_3 sedangkan gerakan N-N dalam interval T_2-T_4 .

2) *Burn (boom)*

Oleh karena berbagai faktor maka pertumbuhan ekonomi terjadi begitu baik sehingga titik kulminasinya jauh diatas biasanya. Dalam gambar diagram 2.1, terlihat pada periode waktu T_5 titik kulminasi yang jauh diatas biasanya dan disebut dengan *burn (boom)*

3) Depresi (*Depression*)

Terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi jauh di bawah dari titik nadir yang biasanya, dan pada gambar diagram 2.1 tercermin dari periode waktu T_6 . Kondisi tersebut disebut dengan kondisi depresi (*depression*).

Ukuran perumbuhan ekonomi tidak dalam satuan rupiah melainkan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari tahun ketahun maka perekonomian negara semakin bertumbuh dan sebaliknya. Namun hal yang perlu diperhatikan jika pertumbuhan yang negatif sebab pertumbuhan yang negatif mengindikasikan pendapatan nasional suatu negara kecil dari tahun ke tahun

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 10 Tahun Terakhir

TAHUN	BESAR PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
2010	6.22%
2011	6.49%
2012	6.26%
2013	5,73%
2014	5,01%
2015	4.88%
2016	5,03%
2017	5,07%
2018	5,17%
2019	5,02%
2020	2.07%

Sumber: Kementerian Keuangan

Fenomena yang di temukan dewasa ini di kancah internasional adalah kondisi global yang kurang kondusif menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi secara global. Munculnya ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara. Kondisi ini kemudian mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 mengalami kontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%, terendah sejak krisis finansial global. Ekonomi negara maju dan negara berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7% pada 2019, melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 2,2% dan 4,5%.



Diagram 2.4 Grafik Pertumbuhan ekonomi dan Volume Perdagangan Dunia

Sumber: Bank Indonesia – IMF (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan di masyarakat dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan kebijakan ekonomi dan peran pemerintah dalam mengatur dan menjaga kestabilan perekonomian negara. Indikator pertumbuhan ekonomi berguna untuk mengetahui laju pertumbuhan output dalam suatu perekonomian yang mencerminkan kinerja perekonomian. Masalah pertumbuhan ekonomi salah satu permasalahan yang dipandang penting dalam masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Sukirno (2011) dalam Putri (2020) mengemukakan bahwa dengan mengamati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercapai dari tahun ke tahun maka dapat menilai prestasi dan kesuksesan suatu negara dalam mengendalikan

kegiatan ekonominya dalam jangka pendek serta dapat mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang.

2.1.4 Hubungan Antara Ekonomi, Keamanan Nasional, Ancaman Dan Kebijakan Pertahanan Nasional

Interaksi antara ekonomi, keamanan nasional, dan pertahanan memiliki empat level yang memiliki saling ketergantungan yakni (Setiadji, 2020):

- 1) Manajemen perekonomian nasional dalam rangka menghasilkan efektivitas dan efisiensi bidang pertahanan negara termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran pertahanan dan non- pertahanan sepenuhnya ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah yang sesuai dengan prioritas nasional
- 2) Ekonomi nasional yang sebagai sumber utama dalam memberikan dukungan sumber daya keamanan nasional, yang ditujukan untuk memberikan pengaruh deferensi (mencegah musuh mengambil tindakan yang belum akan dimulai. Saat ini, strategi dan kebijakan militer lebih kepada seni koersi (pencegahan) atau intimidasi dan deterensi. Kemampuan pertahanan hanya kepada satu dari banyak instrumen pertahanan yang didukung oleh kekuatan ekonomi. Instrumen lain termasuk kebijakan perdagangan, program bantuan, sistem keuangan, postur utang, regulasi imigrasi, dan semua alat kebijakan ekonomi lain.
- 3) Pengaruh ekonomi makro terhadap alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan suatu negara dalam konteks nasional, mempengaruhi hubungan dengan sistem perekonomian global, yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan maupun munculnya perlombaan persenjataan (*arms race*) termasuk pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional-regional dan kesejahteraan
- 4) Dalam ekonomi mikro, sistem perekonomian nasional yang kuat diharapkan dapat menjadi sumber daya utama dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keamanan nasional maupun kesejahteraan bangsa. Tingkat saling ketergantungan antara ekonomi dan pertahanan yang didasari pada anggapan bahwa pada aspek keamanan internasional selalu berkaitan dengan insentif ekonomi yang dihadapi oleh negara yang untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat negaranya. Preferensi terhadap kebutuhan akan penguasaan di berbagai bidang termasuk teknologi dan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya yang tidak dimiliki negaranya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penaklukan, kolonisasi dan penguasaan wilayah menjadi efektif dari segi biaya atau cara lain yang dapat ditempuh adalah peningkatan kerja sama antar negeri, aliansi, peningkatan produksi nasional, devisa negara, investasi, dan menjaga kualitas dan kuantitas perdagangan internasional.

2.1.5 Hubungan Antara Jumlah APBN Dengan Anggaran Pertahanan

Anggaran penerimaan belanja negara merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson, pengertian anggaran (budget) adalah “*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Brzoska dalam Hartley dan Sandler (1995) berpendapat bahwa belanja militer adalah biaya untuk membangun kekuatan pertahanan negara baik dalam masa perang maupun masa damai

Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan

merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Pengeluaran belanja pertahanan merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah Negara dan merupakan suatu yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat (Kunio, 1999). Anggaran pertahanan merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Belanja pertahanan pada dasarnya untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya sarana pertahanan dalam kurun waktu tertentu. Secara mekanismenya, semakin besar APBN tahunan suatu negara maka semakin besar pula Anggaran pertahanan. Masing-masing negara berupaya untuk meningkatkan Anggaran pertahanan, mengingat anggaran militer sudah pasti membutuhkan ketersediaan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu upaya peningkatan anggaran pertahanan harus dibarengi dengan peningkatan APBN. Salah satu contoh konkret adalah negara-negara yang memiliki anggaran pertahanan yang besar dan negara tersebut memiliki anggaran/budget yang besar juga.

Seperti yang diketahui, upaya dalam pengadaan alutsista erat kaitannya dengan alokasi belanja pemerintah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Tingginya alokasi anggaran belanja pertahanan menunjukkan bahwa secara umum keunggulan kekuatan militer masih dianggap bernilai strategis dalam mencapai tujuan nasional. Penurunan anggaran pertahanan di sejumlah negara tertentu pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian anggaran dan tidak merepresentasikan menurunnya keinginan untuk pembangunan kekuatan. Sejalan dengan pemulihan perekonomian global, kebutuhan untuk pengembangan kekuatan militer akan semakin meningkat.

2.1.6 Hubungan Antara Produk Domestik Bruto Dengan Anggaran Pertahanan

Bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan instrument utama untuk mencapai cita-cita nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan melalui sisi pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domesti Bruto (PDB). Secara mekanismenya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi maka upaya peningkatan penerimaan pajak perlu untuk ditingkatkan.

Pengeluaran belanja pertahanan dapat dinyatakan sebagai sebuah *input* dalam suatu sistem pertahanan keamanan dan output yang akan dicapai adalah kinerja dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional, memenangkan peperangan, serta memiliki kemampuan untuk meredam berbagai ancaman (Putri, 2020). Pengeluaran pertahanan sering digunakan sebagai ukuran output karena tidak ada indikator lain yang mudah didapat mengenai kekuatan pertahanan yang dihasilkan dari kegiatan pertahanan, dimana output dari pertahanan adalah terwujudnya rasa aman dan tercapainya keamanan yang bersifat *intangible*.

Dari segi pertahanan, PDB kerap kali digunakan sebagai indikator untuk melihat besaran anggaran Pertahanan negara (dalam harga konstan/tingkat harga berjalan sebagai porsi PDB dan pada basis perkapita) dalam upaya belanja pertahanan. Selain itu, komparasi antara PDB dan anggaran pertahanan juga sebagai alat ukur yang umumnya digunakan untuk melihat kapabilitas pertahanan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendapatan nasional yang erat kaitanya Produk Domestik Bruto. Kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari persentase atau jumlah Pendapatan nasional yang diperoleh pada periode waktu tertentu. Salah satu indikator alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional atau biasa disebut dengan pendapatan nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada periode tertentu. Besarnya pendapatan nasional merupakan gambaran awal sebenarnya

efisiensi sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal dan uang) yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa. Jika pendapatan nasional semakin besar maka semakin baik efisiensi alokasi sumber daya perekonomian suatu negara

Hingga saat ini yang menjadi kendala utama dalam pembangunan postur militer yang kuat pada Negara di dunia terutama negara berkembang adalah lemahnya perekonomian nasional sebagai akibat rendahnya pendapatan nasional (PDB). Jika kekuatan militer mengikuti keadaan perekonomian pada negara berkembang, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak akan pernah mampu membangun kekuatan militer yang tangguh oleh karena keterbatasannya dalam pendapatan nasional

2.1.7 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Anggaran Pertahanan

Ekonomi merupakan salah satu pondasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu Negara. Seperti yang dikemukakan oleh Sukirno (2011:49) dalam Putri (2020) bahwa dengan mengamati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tercapai dari tahun ke tahun maka dapat menilai prestasi dan kesuksesan suatu negara dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek serta dapat mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan instrument utama untuk mencapai cita-cita nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks

perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut.

Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka negara tersebut akan berupaya untuk berpengaruh di dunia internasional dengan memperbesar pengeluaran pertahanannya. Semakin besar kekayaan ekonomi suatu Negara maka semakin besar pengeluaran pertahanannya. Kebijakan pembangunan kekuatan militer tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu parameter bagi kemampuan pemerintah untuk membiayai program Litbang dan pengadaan Alutsisita.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Relevansi tersebut dapat terkait dengan objek penelitian, teori yang digunakan, maupun aspek-aspek lainnya yang dapat digunakan sebagai basis analisis dalam penelitian ini. Peneliti mencari beberapa penelitian yang relevan dan mendukung sehingga dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini.

2.2.1 Penelitian Deger (1995)

Penelitian yang dilakukan oleh Saadet Deger and Somnath Sen berjudul "*Military Expenditure And Developing Countries*" meneliti terkait hubungan pengeluaran militer di negara berkembang dengan pertumbuhan, pembangunan, keamanan dan pemerintahan. Deger Dkk memberikan survei analitis tentang efek dan penyebab pengeluaran pertahanan di negara berkembang dan membahas beberapa aspek inti dari keterkaitan antara pertahanan dan pembangunan. Hal yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pertahanan, keamanan serta pengembangan. Deger Dkk di dalam penelitian menyatakan bahwa untuk memahami sifat pengeluaran

militer di negara berkembang, peneliti harus melampaui bidang ekonomi. Selain itu, pertimbangan *geo-strategis* seringkali menambah dimensi utama pada situasi yang sudah kompleks. Deger Dkk berpendapat bahwa perspektif ekonomi pembangunan harus diutamakan ketika dilakukan penelitian mengenai alokasi pertahanan di negara-negara berkembang. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat pembangunan ekonomi, yang diberikan oleh ukuran standar pendapatan per kapita, tidak berpengaruh atau kontradiktif terhadap anggaran belanja militer.

Menurut penelitian ini, terdapat enam saluran dimana terdapat pengaruh antara pengeluaran militer dengan perekonomian. *Pertama*, belanja militer dapat meningkatkan keamanan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan sosial secara agregat. *Kedua*, alokasi anggaran belanja pertahanan dapat meningkatkan produktivitas faktor total melalui pelatihan personel militer, menciptakan infrastruktur, meningkatkan kemajuan teknis melalui penelitian dan pengembangan militer (untuk negara berkembang yang memiliki basis industri pertahanan) serta *spin-off* lainnya. Keduanya memiliki memberi pengaruh positif namun sisi negatifnya adalah terdapat kendala anggaran pemerintah dan *crowding-out*. *Ketiga*, adalah pertukaran antara dua jenis barang publik; jika belanja militer dilakukan dengan mengorbankan investasi dalam pendidikan maka pembentukan keterampilan akan terhambat dan tingkat pertumbuhan jangka panjang dapat terpengaruh secara merugikan. Saluran *keempat* adalah ketika pengeluaran pemerintah sipil dikurangi untuk membiayai alokasi pertahanan tambahan dan ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, jika tambahan pengeluaran pertahanan dibiayai melalui perpajakan maka hal ini dapat mengurangi konsumsi dan / atau investasi yang mempengaruhi kesejahteraan atau akumulasi modal fisik. Akhirnya, militer juga menggunakan tenaga kerja terampil (korps perwira, atau ilmuwan dan insinyur dalam produksi pertahanan) dan ini menunjukkan hilangnya modal manusia bagi perekonomian lainnya. Jelas bahwa tidak semua

faktor ini beroperasi pada waktu yang sama dan untuk semua negara. Namun, model tersebut harus mampu menganalisis implikasinya.

Penelitian ini menggunakan metode *The externality* dimana model ini telah banyak digunakan untuk berbagai sub-sektor ekonomi - ekspor, pemerintah, militer, jasa keuangan dan merupakan studi empiris yang bagus untuk menyelidiki dampak pengeluaran militer terhadap pertumbuhan dengan pertimbangan ekonomi dua sektor, variabel Q yaitu keluaran sipil dan variabel M adalah keluaran militer. Ada dua fungsi produksi (neoklasik) di mana keluaran Q bergantung pada masukan faktor (tenaga kerja dan modal) tetapi juga keluaran M. Dalam arti tertentu, militer produksi karena *spin-off* atau eksternalitas dapat mempengaruhi output sipil melebihi dan di atas yang dapat diproduksi oleh input faktor saja. Namun, kemungkinan juga tetap bahwa eksternalitasnya negatif dan militer menguras produktivitas sektor sipil.

Terdapat dua fungsi produksi (neoklasik) di mana keluaran Q bergantung pada masukan faktor (tenaga kerja dan modal) serta keluaran M. Faktor produksi militer i mengalami *spin-off* atau eksternalitas dapat mempengaruhi output sipil melebihi dan di atas yang dapat diproduksi oleh input faktor saja. Namun, kemungkinan juga tetap bahwa eksternalitasnya negatif dan militer menguras produktivitas sektor sipil. Hasil daripada penelitian ini adalah pertahanan dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan pada keamanan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu menempatkan model teoritis dalam konteks pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas dimana keamanan, selain pertumbuhan, juga menambah kesejahteraan sosial.

2.2.2 Penelitian Yakolev (2007)

Penelitian yang dilakukan oleh Yakovlev pada tahun 2007 dengan judul "*Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth*". Penelitian ini membahas terkait hubungan antara perdagangan senjata, pengeluaran militer serta pertumbuhan ekonomi dengan lokus penelitian di 28 negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik estimasi *fixed effect model* (FEM), *random effect model* (REM), serta Arellano-Bond GMM. Data yang digunakan adalah data panel dengan variable pengeluaran militer, perdagangan senjata serta pertumbuhan ekonomi di 28 negara yang diteliti selama tahun 1965 – 2000. Tujuan penelitian dari jurnal ini adalah untuk menguji ada atau tidaknya hubungan sistemik antara perdagangan senjata dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran militer yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diuji menggunakan FEM, REM, serta Arellano-Bond GMM menunjukkan jika berdasarkan hasil regresi Sollow-style, pengeluaran militer memiliki hubungan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor senjata memiliki hubungan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, interaksi antara pengeluaran militer dan ekspor senjata memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi pengeluaran militer dan ekspor senjata secara terpisah dapat melemahkan pertumbuhan ekonomi tetapi semakin tinggi pengeluaran militer semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

2.2.3 Penelitian Dogan dan Cheong (2006)

Penelitian mengenai Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Nasional: Uji Kausalitas Untuk Lima Negara Asia Tenggara (*Government Expenditure And National Income: Causality Tests For Five South East Asian Countries*). Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional dengan menguji hipotesis Wagner dan kebalikannya untuk lima negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Studi ini mengkaji arah kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan studi kasus mengenai apakah peningkatan

pengeluaran pemerintah merupakan penyebab pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi merupakan penyebab peningkatan pengeluaran pemerintah terutama penting bagi negara-negara berkembang di mana sektor publik menyerap bagian yang relatif besar dari sumber daya ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan data deret waktu untuk memeriksa arah kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan. Peneliti pertama-tama memeriksa sifat statistik dari data, seperti stasioneritas, dan mencoba untuk menentukan apakah ada hubungan jangka panjang antara kedua variabel dengan menggunakan metode kointegrasi. Kemudian peneliti menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Granger untuk menguji dua hipotesis. Hipotesis pertama yang diuji adalah bahwa pengeluaran pemerintah bersifat endogen, hasil dari pertumbuhan pendapatan nasional (biasanya dikenal sebagai hukum Wagner). Hipotesis kedua adalah pengeluaran pemerintah merupakan faktor eksogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.

Peneliti selanjutnya menggunakan metode kointegrasi Johansen-Juselius untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional per kapita riil dan pengeluaran pemerintah per kapita riil di semua negara sampel, tetapi tidak mendeteksi hubungan tersebut, kecuali untuk Indonesia. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hukum Wagner tidak didukung oleh data dari lima negara dalam sampel. Ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat dari pendapatan per kapita riil ke pengeluaran pemerintah per kapita riil. Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hipotesis terbalik hanya didukung oleh data Filipina, yang menunjukkan bahwa arah kausalitas adalah dari pengeluaran pemerintah hingga pendapatan nasional. Temuan dari peneliti juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di empat negara dalam studi (Filipina adalah pengecualian). Peneliti juga memperkenalkan hukum Wagner secara mendetail. Wagner memandang pengeluaran

publik sebagai faktor endogen, yang ditentukan oleh pertumbuhan pendapatan nasional (Wagner, 1890). Hubungan yang ia dalilkan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional pada akhir abad ke-19 kemudian dikenal sebagai "hukum" Wagner, yang pada dasarnya menyatakan bahwa dengan meningkatnya pendapatan per kapita, kepentingan sektor publik akan tumbuh (Bird, 1971, h. 2).

Wagner mengajukan tiga alasan mengapa bagian dari pengeluaran pemerintah PDB akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, seiring kemajuan industrialisasi, aktivitas sektor publik akan menggantikan aktivitas sektor swasta karena fungsi administratif dan pelindung negara akan semakin penting selama proses industrialisasi. Peran negara dalam menjaga ketertiban dan ketertiban serta perannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan regulasi ekonomi kemungkinan besar akan semakin terasa karena semakin kompleksnya kehidupan ekonomi dan urbanisasi yang terjadi pada masa industrialisasi. Selain itu, pengeluaran publik untuk layanan budaya dan kesejahteraan (termasuk pendidikan dan redistribusi pendapatan) juga akan meningkat karena negara mengalami industrialisasi karena elastisitas pendapatan yang tinggi dari permintaan untuk layanan ini - asumsi implisit dalam karya Wagner. Artinya, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita, permintaan akan layanan yang disebutka, yang biasanya disediakan oleh pemerintah, meningkat dengan cepat, meningkatkan porsi pengeluaran sektor publik dalam PDB.

Penelitian ini menggunakan metodologi kausalitas tipe Granger untuk menentukan arah kausalitas antara dua variabel yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Data Produk Domestik Bruto tahunan, Total Pengeluaran Pemerintah dan populasi setiap negara berasal dari Tabel Dunia, Bank Dunia. Menggunakan data tahunan sesuai di sini karena pengeluaran pemerintah tidak terlalu sensitif terhadap musiman dan siklus fluktuasi.

Menurut hasil penelitian, dimana PDB per kapita riil (Y) dan pengeluaran Pemerintah per kapita riil (G) untuk kelima negara tersebut terbukti dari plot adalah hubungan positif antara kedua variabel. Pada Plot terdapat tren peningkatan dalam PDB per kapita riil (Y) dan pengeluaran Pemerintah per kapita riil (G) untuk kelima negara tersebut. Juga terbukti dari plot adalah hubungan positif antara kedua variabel.

Peneliti juga ingin mengetahui apakah asosiasi positif ini menyiratkan bahwa lebih banyak pengeluaran pemerintah menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi atau pendapatan yang lebih tinggi mengarah pada lebih banyak pengeluaran. Ada kemungkinan juga bahwa hubungan antara kedua variabel tidak kausal ke segala arah, tetapi hanya kebetulan. Oleh sebab itu, peneliti memulai dengan mengidentifikasi urutan integrasi, $I(d)$, dari kedua seri.

Peneliti melakukan uji Granger dengan istilah koreksi kesalahan dari persamaan kointegrasi yang termasuk dalam regresi yang juga mencakup variabel sekali berbeda. Penemuan berdasarkan penelitian ini bahwa tidak ada hubungan kausalitas, satu arah atau dua arah, antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional (kecuali untuk Filipina dimana kebalikan dari hipotesis Wagner didukung) mungkin karena kekurangan data dan masalah metodologis. Misalnya, mungkin ada bias yang ditimbulkan dengan menggunakan data pengeluaran pemerintah agregat. Ada kemungkinan bahwa komponen pengeluaran yang berbeda mempengaruhi pendapatan riil dengan cara yang berbeda, tetapi ketika data pengeluaran agregat digunakan, efek ini mungkin sulit untuk dideteksi. Jika demikian, studi lebih lanjut tentang masalah yang sama dengan data pengeluaran pemerintah terpilih akan diperlukan.

Temuan penelitian ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Dimulai dengan hipotesis Wagner. Untuk mendeteksi hubungan kausal yang dihipotesiskan antara pendapatan nasional dan belanja pemerintah, tingkat kenaikan belanja pemerintah harus lebih besar daripada yang sebelumnya, sehingga porsi belanja pemerintah dalam pendapatan

nasional meningkat seiring waktu. Namun, untuk beberapa alasan, jika pengeluaran terus meningkat dengan kecepatan yang lebih lambat dari pada kecepatan pertumbuhan pendapatan nasional; hubungan sebab-akibat yang dihipotesiskan antara keduanya akan melemah, sehingga lebih sulit untuk mendeteksi hubungan dalam data

Proses *crowding out* standar mungkin berjalan di negara-negara yang diteliti. Penelitian ini mengacu pada efek negatif yang terkenal dari peningkatan pengeluaran pemerintah pada konsumsi dan investasi swasta melalui peningkatan tingkat bunga riil. Ini akan menjadi kasus jika terjadi defisit pemerintah, dan defisit dibiayai oleh hutang dalam negeri. Pembiayaan hutang dapat menyebabkan tekanan kredit, dan selanjutnya meningkatkan suku bunga riil. Hasilnya, setidaknya, secara teoritis, adalah desakan konsumsi dan investasi swasta.

2.2.4 Penelitian Abu-Bader, Sulaeman & Abu-Qarn, Amer S. (2003)

Penelitian yang dilakukan oleh Abu-Bader dan Abu-Qarn pada tahun 2003 berjudul "*Government expenditures, military spending and economic growth: causality evidence from Egypt, Israel, and Syria*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model *multivariate cointegration* dan *variance decomposition* untuk menguji hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Mesir, Israel, dan Syria dalam kurun waktu 30 tahun.

Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan jika pengeluaran militer cenderung menjadi variabel eksogen dan independent terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran masyarakat sipil di Israel dan Syria, namun di Mesir variabel tersebut justru menjadi Batasan dari pengeluaran militer. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena Israel dan Syria merupakan masih menjadi bagian dari dua penyebab utama dari konflik antara Israel dan Arab. Sehingga, masing-masing negara semakin meningkatkan pengeluaran militer dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan

jika *military burden* berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga negara yang diuji dan anggaran belanja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Israel dan Mesir.

2.2.5 Penelitian Pieroni (2007)

Teori pertumbuhan endogenus menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh penting terhadap laju pertumbuhan jangka panjang. Pengaruhnya tergantung pada besarnya intervensi pemerintah dan berbagai komponen belanja publik. Selain itu, berbagai jenis pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang heterogen terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, sementara teori yang ada menetapkan pengeluaran pemerintah yang produktif sebagai peran kunci dalam memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi kondisi-mapan yang lebih tinggi, temuan empiris umumnya tidak mendukung hubungan ini. Untuk menyelidiki hubungan, peneliti membuat model pengeluaran militer sebagai masalah terpisah dalam fungsi produksi sehubungan dengan pengeluaran pemerintah non-militer lainnya. Ini menyiratkan bahwa pemerintah memutuskan tentang alokasi belanja militer dengan cara yang saling melengkapi untuk input swasta yang kompetitif satu sama lain untuk layanan publik. Pada bagian empiris, kerangka kerja ini memungkinkan kita untuk menguji bagaimana pengaruh parsial pengeluaran militer terhadap pertumbuhan dapat bervariasi sesuai dengan bagian awal yang berbeda dari pengeluaran pemerintah untuk kategori non-militer. Sementara efek pengeluaran militer berbeda apakah ancaman terhadap keamanan tinggi atau rendah, ketidakamanan ekonomi dapat mendorong efisiensi pemerintah yang lebih besar. Faktanya, ketidakamanan dapat menyebabkan pemerintah mengganti pengeluaran yang tidak efisien dengan pengeluaran sipil yang lebih efisien (Landau, 1996; Stroup dan Heckelman, 2001). Idealnya, hipotesis dalam penelitian ini mengenai pengaruh pengeluaran militer terhadap pertumbuhan harus dimasukkan ke dalam model pertumbuhan umum. Meskipun ada sejumlah besar

kontribusi teori tentang pengaruh komponen pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, bukti empirisnya beragam. Oleh karena itu, menurut peneliti sulit untuk mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah dalam kategori produktif atau tidak produktif. Dampaknya pada pertumbuhan diserahkan pada hasil empiris. Peneliti mempertimbangkan model pertumbuhan dengan teknologi endogen di mana dampak pengeluaran militer pada kinerja ekonomi tidak bergantung pada pilihan model sisi penawaran atau sisi permintaan (Sandler dan Hartley, 1995). Kerangka kerja ini menggunakan konsumsi rumah tangga, mengakumulasi dan membayar pajak sehubungan dengan komoditas gabungan tunggal. Pemerintah menyediakan keamanan dengan membelanjakan untuk pertahanan dan menyediakan layanan publik dengan berinvestasi dalam konsumsi dan infrastruktur (Barro, 1990; Devarajan et al., 1996).

Model empiris untuk permintaan pengeluaran militer secara umum telah ditetapkan sebagai fungsi dari sosioekonomi, faktor kelembagaan dan ancaman terhadap keamanan. Ancaman internal dan eksternal telah ditemukan memiliki hubungan statistik yang positif dengan pengeluaran militer (Dunne dan Perlo-Freeman, 2003). Jadi, sebagaimana dikemukakan teori, guncangan keamanan menyebabkan porsi awal belanja militer meningkat dan, pada saat yang sama, mengarah pada perubahan komposisi belanja nonmiliter dalam fungsi produksi. Peneliti menyebut efek terakhir sebagai efek alokasi ulang dari pengeluaran pemerintah sipil

Landau (1996) menemukan bukti bahwa hipotesis realokasi menghasilkan pengeluaran pemerintah yang lebih efisien. Dalam sampel negara berkembang ia menemukan bahwa bagian yang lebih tinggi dari pengeluaran militer tidak terkait dengan bagian yang lebih rendah dari pengeluaran pemerintah yang produktif seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hasil ini dapat dirasionalkan dengan mengatakan bahwa perilaku non-linier dari hubungan pertumbuhan anggaran militer

mendorong pembuat kebijakan untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang lebih efisien, terutama di negara berkembang. Lebih tepatnya, hipotesis perilaku adalah bahwa ketika persepsi penduduk tentang ancaman eksternal meningkat, kemungkinan pembuat kebijakan dapat menarik lebih banyak pajak dan mengalokasikan bagian pendapatan tambahan untuk sektor pertahanan dan sebagian untuk kebijakan publik yang lebih efisien. Ini tidak berarti bahwa efisiensi perbatasan ekonomi mereka dapat diperoleh hanya dengan mengganti pengeluaran pemerintah yang tidak produktif dengan kegiatan produktif. Ini karena produktivitas setiap kategori pengeluaran bergantung pada bagian awalnya terhadap PDB dan saling melengkapi di antara input (Devarajan et al., 1996). Singkatnya, variabel penjelas utama dari persamaan pertumbuhan adalah bagian dari pengeluaran pemerintah militer dan non-militer, yang diasumsikan memiliki tanda negatif dalam perkiraan empiris. Namun, peneliti memasukkan variabel untuk menjelaskan interaksi antara beban militer dan porsi pengeluaran non-militer (pemerintah) yang dianggap bertanggung jawab atas efek nonlinier. Dampaknya terhadap pertumbuhan diharapkan positif dan oleh karena itu akan mengurangi dampak negatif pengeluaran militer terhadap pertumbuhan dalam persamaan utama. Peneliti mengusulkan bahwa pendekatan nonparametrik dapat memeriksa kekuatan estimasi parametrik model, yang dapat menyertakan atau tidak menyertakan variabel interaksi, pemerintah. Strategi analisis dilakukan dengan mengikuti estimasi parametrik yang dihasilkan oleh AG (2006). Sesuai dengan hasil AG (2006), Peneliti menemukan bahwa beban militer memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mengasumsikan relevansi dalam menjelaskan hipotesis Landau. Karena istilah interaksi pemerintah memiliki hubungan positif seperti yang diharapkan dan secara statistik signifikan, guncangan terhadap ancaman keamanan menyebabkan tingkat pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi dalam kategori militer dan nonmiliter. Dampak pengeluaran terhadap

pertumbuhan porsi pengeluaran pemerintah sipil diperkirakan negatif dan mewakili potensi pemerintah untuk menggunakan sumber daya untuk memberlakukan kebijakan sektor publik yang secara ekonomi tidak produktif.

Makalah ini membahas apakah metode regresi pertumbuhan yang diperoleh dari model pertumbuhan endogen sesuai untuk mengukur hubungan antara beban militer dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena bagian dari pengeluaran pemerintah dipercaya dapat menjelaskan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, peneliti membuat model tingkat pertumbuhan kondisi-mapan dengan memasukkan bagian awal dari komponen sipil dan militer. Peneliti mengganti dampak nonlinier dari ancaman eksternal dengan istilah interaksi untuk menjelaskan pengaruh alokasi ulang pengeluaran pemerintah antara komponen sipil dan militer. Hipotesis di balik pilihan ini adalah bahwa bagian dari pengeluaran militer, yang menggabungkan guncangan eksternal terhadap keamanan negara, dapat menghasilkan efek realokatif yang signifikan dalam efisiensi pengeluaran pemerintah. Hasil parametrik sejalan dengan temuan empiris sebelumnya mengenai hubungan antara porsi pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ditemukan dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan kuadrat pengeluaran militer ketika variabel ini digunakan sebagai proxy untuk bentuk-bentuk alternatif hubungan nonlinier. Ketangguhan estimasi diuji dengan pendekatan nonparametrik yang diterapkan pada dua sub-sampel: kelompok dengan tingkat pengeluaran militer tinggi dan kelompok kedua dengan pengeluaran militer rendah. Untuk kelompok pertama peneliti menemukan hubungan negatif yang lemah antara bagian pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi ketika istilah realokatif dikecualikan; perubahan rezim terjadi di bagian terakhir sub-sampel ini. Namun, hubungan negatif menjadi signifikan hanya jika istilah interaksi dimasukkan: variabel ini mengurangi dampak negatif dari beban militer tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara dengan beban militer

yang lebih rendah menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara beban militer dan pertumbuhan dengan estimasi non-parametrik yang mendekati analisis parametrik. Sebagai kesimpulan, hasil tersebut mengkonfirmasi bahwa hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan mungkin mengandung nonlinier selain yang dihipotesiskan oleh model pertumbuhan tradisional di mana variabel kontrol yang sesuai tidak disertakan. Dalam arah ini, pendekatan nonparametrik tampaknya menjadi alat yang berguna untuk penelitian masa depan untuk menghindari kesalahan spesifikasi fungsional dalam persamaan pertumbuhan.

2.2.6 Penelitian Pieroni (2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Luca Pieroni berjudul "*Military Expenditure and Economic Growth*". Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi dengan memasukan dampak dari share pengeluaran militer dan aspek sipil dari pengeluaran pemerintah dalam sebuah pertumbuhan ekonomi dengan teknologi sebagai faktor endogen. Hasil uji secara empiris menunjukkan jika antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi mengandung hubungan non-linearitas. Parameter partial correlations searah dengan penemuan empiris, dimana estimasi robustness diuji menggunakan non-parametric approach. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika terdapat hubungan negative antara anggaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi di locus penelitian yang dilakukan.

2.2.7 Penelitian Ram (1990)

Penelitian ini melakukan penelitian empiris terhadap hubungan antara pengeluaran pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggabungkan tiga model analisis yakni: uji kausalitas granger, *fixed-effect* modelling serta *regression diagnostics*. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan hasil penelitian empiris terkait pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan secara substansial yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah dampak yang dihasilkan dari adanya variabel pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang memengaruhi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika terdapat hubungan yang bersifat positif maupun negative dari variabel pengeluaran pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Ram, belum ada cukup bukti yang dapat menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara positif oleh pengeluaran militer. Hal tersebut didasari oleh hasil penelitian yang menunjukkan dampak negative dari pengeluaran pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terdapat beberapa variabel yang sering digunakan dalam penelitian terkait pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang berbeda terhadap pengolahan data yang dilakukan.

2.2.8 Penelitian Kollias, Manolas, dan Paleologou (2004)

Penelitian terkait hubungan antara pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi di 15 negara di Uni Eropa dengan menggunakan uji kausalitas granger dan uji kointegrasi pada periode waktu tahun 1961 sampai dengan tahun 2000. Hipotesis awal adalah adanya hubungan yang bersifat *uni-directional causality* dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran militer dan sebaliknya. Data yang digunakan merupakan data tahunan dari 15 negara anggota Uni Eropa yaitu data tingkat pertumbuhan Ekonomi yang didapatkan dari *European Commission's European Economy* serta data share pengeluaran militer yang didapatkan dari Buku Tahunan SIPRI.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 15 negara anggota European Union menunjukkan jika tidak terdapat (negatif) hubungan kausalitas antara pengeluaran militer terhadap pertumbuhan

ekonomi. Meskipun demikian, terdapat bukti empiris jika hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta yang menunjukkan jika dalam pembuatan anggaran pengeluaran militer di negara-negara European Union berdasarkan kepada kondisi perekonomian di negara tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan jika tidak terdapat bi-directional causality di 5 negara European Union, berdasarkan penelitian tersebut diperlukan adanya kebijakan yang dapat membantu terlaksananya kebijakan pertahanan di Uni Eropa yang berupa CEDSP (*Common European Security and Defense Policy*).

2.2.9 Avatara (2013)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1992 – 1997 mengalami pertumbuhan yang positif. Akan tetapi, pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar minus 13,13%, hal ini dikarenakan terjadinya krisis berkelanjutan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih kembali. Di Indonesia, peran pemerintah adalah sebagai motivator (*agent of development*) dan pengendali pembangunan (Djayasinga, 2006). Salah satu peran pemerintah yaitu dalam merumuskan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dalam perekonomian, mengatur redistribusi pendapatan dan kekayaan serta mempertahankan kesempatan kerja penuh (*full employment*) (Suparmoko, 1980). Kebijakan fiskal juga berkaitan erat dengan pendapatan, pengeluaran dan pinjaman negara beserta pemanfaatannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal tersebut. Fungsi adanya APBN adalah pertama sebagai perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara, kedua untuk mengendalikan gelombang pasang surut ekonomi (Djayasinga, 2006). Untuk dapat menutupi defisit anggaran tersebut,

Indonesia harus memiliki sumber pendanaan yang mumpuni baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan dari dalam negeri contohnya adalah dari sektor perpajakan. Penerimaan yang bersumber dari perpajakan ini merupakan sumber penerimaan yang cukup potensial karena hampir semua aktivitas perekonomian Indonesia tidak luput dari pengenaan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Reta dan Samsubar (2008) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970 – 2003 (Kajian dari Sisi Fiskal)”. Penelitian yang dilakukan oleh Reta dan Samsubar menggunakan empat variabel independen yaitu Cicilan dan Bunga Pinjaman Hutang Luar Negeri, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/Swasta, Penerimaan Pajak, dan Pengeluaran Pembangunan serta satu variabel dependen yaitu Produk Domestik Bruto.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode Analisis Regresi Linier Berganda (*Ordinary Least Square*). Untuk melihat pengaruh Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal, dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia dengan uji t dan uji F. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011 di kaji dari sisi fiskal. Secara parsial, Penerimaan perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011. Secara parsial, variable Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia (UPI), Belanja Modal (BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PDB). Penerimaan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), Utang pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB),

pengaruh variabel Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan.

2.2.10 Suyono (2014)

Krisis ekonomi terkini telah menimbulkan serangkaian pertanyaan tentang langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk merangsang kegiatan ekonomi. (Mutaşcu & Dănuleşiu 2011) Hubungan antara penerimaan pajak dengan PDB menjadi fokus di bidang ekonomi, maksimalisasi penerimaan pajak tidak sejalan dengan maksimalisasi PDB. (Ma 2001). Banyak ekonom setuju dengan proposisi bahwa "pajak tinggi buruk bagi pertumbuhan ekonomi" dan menggunakan pengganda pajak untuk sering menganalisis korelasi negatif ini.

Produk Domestik Bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diakui secara resmi yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu. (Goossens et al. 2007) Ini mencakup semua konsumsi swasta dan publik, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor lebih sedikit impor yang terjadi dalam wilayah tertentu. PDB biasanya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta untuk mengukur standar hidup suatu negara. (Investopedia 2009). Pajak adalah biaya keuangan atau pungutan lain yang dikenakan kepada wajib pajak (orang perseorangan atau badan hukum) oleh negara atau yang setara dengan fungsi suatu negara sehingga kegagalan membayar dapat dihukum oleh undang-undang. (Garner 2009) Pengganda pajak digunakan untuk mengukur perubahan produksi agregat yang disebabkan oleh perubahan pajak pemerintah. Ini adalah kecenderungan mengkonsumsi marjinal negatif dikalikan satu dikurangi kemiringan garis pengeluaran agregat.

Perekonomian China telah melompat maju sejak mereka mengikuti kebijakan reformasi dan pembukaan. Sistem perpajakan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pendapatan pajak dan PDB Provinsi Hebei telah mencapai kedua perkembangan tersebut sejak tahun 1995

(reformasi bagi hasil pajak) dan elastisitas pajak telah lebih dari 1 dalam beberapa tahun terakhir. (Lampiran 1) Bagaimana menjelaskan fenomena yang bertentangan dengan teori ini? Hal ini penting karena sedikit studi sebelumnya tentang topik ini, khususnya di China, yang harus menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, peneliti menganalisis hubungan antara mereka pada tahun 1978-2011 dengan teori efek pengganda pajak sederhana dan yang telah diubah dan model polynomial distribution lag (PDL). Ada tiga pertanyaan penelitian dalam makalah ini. (1) Apakah pengganda pajak sederhana menjelaskan dengan tepat penerimaan pajak dan PDB Cina? (2) Apakah penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Hebei? (3) Apakah efek pengganda pajak tertinggal dan semakin jelas?

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam makalah ini peneliti menemukan hasil yang berbeda. Pertama, sebagian besar peneliti, seperti Ergete & Bev (2012), James dan Robert (2006), Ma (2001) dan Peden (1991), berpendapat bahwa pajak yang lebih tinggi menurunkan kesehatan ekonomi. Peneliti menemukan bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan negatif. Kedua, peneliti membuktikan bahwa pengganda pajak sederhana tidak akurat dan memperbaikinya dengan metode yang berbeda. Perubahan yang menunjukkan dampak negatif peningkatan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak seserius yang dibayangkan. Ketiga, pengaruh pengganda pajak tertinggal.

Singkatnya, kontribusi penelitian dari makalah ini adalah (1) peneliti menguji hubungan antara pajak dan PDB provinsi Hebei dari sudut teori efek pengganda pajak. (2) Pengganda pajak yang diubah lebih akurat. Selain itu, tarif pajak marjinal merupakan komponen esensial dalam teori pengganda pajak. (3) Dampak negatif dari peningkatan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin tidak seserius yang diperkirakan oleh sebagian besar peneliti dan pemotongan pajak akan menciptakan

efek yang lebih positif di Provinsi Hebei. (4) Dampak negatif dari pajak semakin berkurang dan semakin jelas.

Makalah ini membahas bagaimana penerimaan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan model PDL yang menunjukkan bahwa pengaruh negatifnya adalah lagging. Sejauh ini yang menjadi perhatian saya, tidak ada penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Hebei dengan model PDL. Oleh karena itu tulisan ini memberikan kontribusi bukti empiris untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan diskusi dan pertanyaan di atas, peneliti menguji hipotesis berikut.

1. H1: Pengganda pajak sederhana mampu menjelaskan penerimaan pajak dan PDB Cina dengan tepat.
2. H2: Penerimaan pajak saat ini memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB.
3. H3: Pengaruh pengganda pajak terhadap pertumbuhan ekonomi tertinggal

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang berupaya memahami perilaku dengan menggunakan pemodelan, pengukuran, dan penelitian matematika dan statistik yang kompleks. Desain penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk memverifikasi hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non-random sampling dan menggunakan spesifik (Indriantoro & Supomo 2002). Kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah Dewan Negara RRT mengumumkan —2012 Economic Statistical Yearbook of Hebei Province dan State Administration of Taxation (SAT) memberikan laporan perpajakan Provinsi Hebei tahun 2012. Pengganda pajak sederhana mengasumsikan bahwa konsumsi adalah satu-satunya komponen yang diinduksi. Namun dalam dunia nyata, konsumsi bukan hanya komponen yang diinduksi. Pengganda lengkap dan kompleks harus disimpulkan.

Dalam artikel ini, ada dua metode untuk mengoreksi rumus pengganda pajak sederhana. Salah satunya adalah metode derivasi matematika. Yang lainnya adalah metode derivasi teoritis. Keduanya mendapatkan rumus yang sama. Berdasarkan pembayaran transfer pemerintah, perpajakan proporsional dan perbedaan antara pendapatan dan pendapatan yang dapat dibuang, peneliti mengoptimalkan rumus pendapatan nasional dan menggunakan proses derivasi parsial untuk menghitung pengganda pajak. Menurut teori pengganda pajak Keynesian, penerimaan pajak (T) tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi (PDB) saat ini, tetapi juga menjaga dampaknya dalam beberapa tahun dengan mengubah konsumsi. Untuk menganalisis dampak secara akurat, makalah ini mengadopsi model polinomial terdistribusi-lag (PDL) tidak termasuk satu atau lebih nilai tertinggal dari pertumbuhan ekonomi. Transformasi log dapat bermanfaat baik untuk membuat pola dalam data lebih dapat ditafsirkan dan untuk membantu memenuhi asumsi statistik inferensial. Peneliti menggunakan LNGDP dan LNT yang koefisiennya mewakili elastisitas. Variabel terikat adalah LNGDP dan variabel bebas meliputi LNT, LNT (-1), LNT (-2), LNT (-3) dan LNT (-4). Sebelum kita memperkirakan dan menguji model PDL, perbedaan panjang maksimum lag k dan polinom m harus ditentukan terlebih dahulu. Seseorang dapat menggunakan kriteria informasi Akaike atau Schwarz untuk memilih panjang lag yang sesuai. Setelah panjang lag ditentukan, seseorang kemudian dapat mencoba untuk menentukan derajat polinomnya sekali lagi dimulai dengan nilai yang besar dan kemudian mengurangnya. (Davison & Mackinnon 1993) Berdasarkan nilai AIC dan SC yang ditunjukkan pada tabel 1, tipe parameter yang Lag-length-nya 4 lebih baik dari yang lain. Nilai R^2 menunjukkan goodness of fit suatu model regresi, oleh karena itu, derajatnya adalah 4.

Perkembangan inkremental dari makalah ini adalah perbedaan model pengukuran dengan penelitian sebelumnya. Model pengembangan tidak hanya menganalisis dampak penerimaan pajak saat ini dari studi

sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan efek lag tidak termasuk nilai-nilai tertinggal dari PDB. Sejauh ini yang menjadi perhatian saya, tidak ada penelitian sebelumnya yang menyelidiki hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak dengan model PDL (Lag-length adalah 4 dan derajat adalah 4). Berdasarkan Analisis Statistik dengan Pengujian Normalitas bahwa tujuan pengujian normalitas adalah untuk mengetahui bahwa semua data variabel independen dan dependen berdistribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas didasarkan pada Jarque-Bera yang merupakan uji goodness-of-fit untuk mengetahui apakah data sampel memiliki kemiringan dan kurtosis yang sesuai dengan distribusi normal. Hipotesis nol adalah hipotesis gabungan kemiringan menjadi nol dan kelebihan kurtosis menjadi nol. Jika probabilitas JB lebih tinggi dari alpha ($\alpha = 0,05$), maka semua data berdistribusi normal. (Gujarati & Porter 2009)

Pengujian Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila gangguan varians tidak konsisten yang terjadi satu sama lain pada semua pengamatan. (Park 1966) Hal ini dapat mempengaruhi koefisien estimasi regresi, underestimation, overestimation, atau misleading. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode park-glejser, dimana jika nilai probabilitas lebih besar dari alpha ($\alpha = 0,05$), berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. (Glejser 1969)

Pengujian Multikolinieritas. Multikolinieritas adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel bebas berada dalam kontribusi linier dengan variabel bebas lainnya. (Kennedy 1992) Artinya satu atau lebih variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Gujarati (2003) menjelaskan bahwa multikolinieritas akan terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,95.

Pengujian Autokorelasi. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi didasarkan pada uji Lagrange multiplier (LM). Engle (1982) telah menunjukkan bahwa ukuran sampel (n) dikalikan R^2 yang diperkirakan dari regresi (bantu) mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan df sama

dengan jumlah pembatasan yang diberlakukan oleh regresi terbatas. Jika nilai Chi-square yang diperoleh dari LM melebihi nilai kritis Chi-square pada tingkat signifikansi (0,05) atau Prob. Chi-square lebih kecil dari 0,05, peneliti menolak regresi terbatas.

Pengujian Hipotesis dalam analisis regresi yang melibatkan data deret waktu, jika model regresi tidak hanya menyertakan nilai saat ini tetapi juga nilai variabel penjelas yang tertinggal (masa lalu), hal itu disebut model lag terdistribusi. Model polynomial distribution-lag (PDL) adalah model finite apth-order distribution-lag yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada penerimaan pajak pada tahun berjalan dalam 4 tahun sebelumnya.

Pendapatan pajak dan PDB Provinsi Hebei telah mencapai perkembangan keduanya sejak reformasi bagi hasil pajak, karena ekonomi adalah sumber pajak dan efek positif dari pajak meningkatkan ekonomi. Situasi seperti itu juga muncul di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Sejak 1995, pemerintah di China termasuk Provinsi Hebei telah meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan pajak untuk meningkatkan infrastruktur, jaminan sosial, layanan publik, pendidikan, dan sebagainya. Mereka tidak diragukan lagi menciptakan lingkungan yang baik untuk pembangunan. Jadi, elastisitas pajak sudah lebih dari 1 dalam beberapa tahun terakhir. Seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, efek pengganda pajak dan efek negatif yang tertinggal akan terlihat jelas.

Pemerintah telah mengambil serangkaian tindakan untuk mereformasi rezim perpajakan yang mencakup program percontohan untuk mengganti pajak bisnis dengan pajak pertambahan nilai, pemotongan pajak bea masuk atas beberapa barang, penyesuaian pajak sumber daya, keringanan pajak untuk perusahaan swasta kecil dan optimalisasi regulasi perpajakan atas konsumsi dan investasi.

Dalam tulisan ini, pengganda pajak yang diubah masih dalam kerangka asumsi yang sederhana. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya pertimbangkan lebih banyak faktor untuk mengoptimalkan fungsi, seperti

investasi, tingkat suku bunga, tingkat harga dan sebagainya. Selain itu, data dikumpulkan dari Provinsi Hebei, yang terlalu kecil untuk dianalisis secara memadai. peneliti menyarankan untuk mengumpulkan lebih banyak data dari semua provinsi di Cina dan menggunakan model Data Panel untuk memperkirakan. Pengganda pajak sederhana adalah rasio dari perubahan produksi agregat ke perubahan otonom dalam pajak pemerintah ketika konsumsi adalah satu-satunya yang diinduksi.

$$\text{LNGDP} = a + \beta_0 \text{LNT}_t + \beta_1 \text{LNT}_{t-1} + \beta_2 \text{LNT}_{t-2} + \beta_3 \text{LNT}_{t-3} + \beta_4 \text{LNT}_{t-4} + \mu_t + [\text{AP} (1)]$$

LNGDP : pertumbuhan ekonomi

LNT_t : pendapatan pajak saat ini

LNT_{t-1} : i th-lag hysteresis effect dari penerimaan pajak

Dari dua fungsi tersebut, peneliti mendapatkan beberapa hasil. Pertama, pengganda pajak yang diubah lebih kecil dari pengganda pajak sederhana. Kedua, tingkat pertumbuhan pengganda pajak yang diubah lebih sensitif daripada pengganda pajak sederhana. Jadi pengurangan pajak dan reformasi struktur pajak lebih efektif. Ketiga, pengganda pajak yang diamandemen diperkirakan di bawah sistem pajak proporsional dan setiap orang harus membayar pajak.

Pengujian Normalitas

Hasil uji normalitas Jarque-Bera menunjukkan nilai asymptotic signifikan 0,277 dan 0,579 lebih tinggi dari alpha ($\alpha = 0,05$). Artinya LNGDP dan LNT berdistribusi normal

Pengujian Heteroskedastisitas

Keluaran uji Park-Glejser untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menunjukkan F-statistic sebesar 0.956, Obs * R² sebesar 4.983 dan Prob.Chi-Square (5) 0.42 lebih besar dari alpha ($\alpha = 0.05$). Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan fungsinya signifikan.

Pengujian Multikolinieritas

Semua koefisien korelasi antar variabel independen lebih tinggi dari 0,95. Artinya terdapat multikolinieritas dalam variabel bebas. Jadi metode OLS

tidak dapat digunakan secara langsung. Namun, pengaruh multikolinearitas antar variabel telah dieliminasi dalam model PDL dan model matematika yang ideal dibangun.

Pengujian Autokorelasi

Level LM dari Prob.Chi-square dalam model 1 kurang dari 0,05. Ini memiliki autokorelasi yang mengganggu estimasi, tetapi dapat dihilangkan dengan metode perbedaan umum. Setelah penyesuaian, model 2 (0,06, 0,09 dan 0,14) tersedia.

2.2.11 Penelitian Amalia Wijayanti (2015)

Penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro dimana pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian makro, Pajak dapat berfungsi untuk mendanai pengeluaran, serta aktivitas negara. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. Pemerintah dapat membebankan pajak yang tinggi atas produk luar negeri guna melindungi dan mendukung produk dalam negeri. Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai jalannya kebijakan terkait dengan stabilitas tingkat harga dan proyek terkait redistribusi pendapatan. penyusunan dan perencanaan penerimaan pajak negara secara lebih akurat agar pajak dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mendanai belanja negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan (Direktorat Penyusunan APBN, 2014). Peran pajak juga dapat dilihat berdasarkan kontribusinya dalam mendanai belanja negara. Sebagai komponen pendapatan negara terbesar, penerimaan pajak juga merupakan sumber utama untuk mendanai belanja negara. Selama tujuh tahun terakhir, lebih dari 65% belanja Negara Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak, sedangkan pendanaan dari

penerimaan non-pajak hanya sekitar 25% dan sisanya didanai dengan hibah, serta hutang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran yang strategis dalam mendanai belanja negara jika dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya.

Penyusunan dan perencanaan penerimaan pajak secara akurat tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan data yang akurat dan model perencanaan penerimaan yang representatif. Diperlukan model perencanaan penerimaan pajak yang akurat agar proyeksi penerimaan pajak dalam APBN tepat. Model perencanaan pajak sangat diperlukan mengingat bahwa penerimaan pajak sebagai sumber utama dana belanja negara, sehingga jika penerimaan pajak tidak memadai nantinya akan terdapat komponen belanja yang telah direncanakan tidak memiliki sumber dana.

Guna mengoptimalkan penerimaan pajak, penyusunan dan perencanaan model pajak perlu dilakukan dengan melibatkan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Terkait hal tersebut telah banyak dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, salah satunya adalah faktor tradisional. Faktor tradisional dapat berupa unsur dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau yang biasa disebut *tax handles*. Analisis faktor tersebut menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak. tersebut, seperti pendapatan per kapita sebagai dasar pajak penghasilan, rasio sector pertambangan (minyak maupun non-minyak) terhadap PDB sebagai dasar pajak penghasilan migas, serta jumlah ekspor dan impor terhadap PDB sebagai dasar pajak perdagangan luar negeri, rasio sektor pertanian terhadap PDB.

Variabel dasar pengenaan pajak terhadap penerimaan pajak pada umumnya menunjukkan hubungan yang positif. Hal tersebut karena jika dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak pemerintah juga akan meningkat. Penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar pada

sistem penerimaan negara di Indonesia. Tak hanya dari sisi penerimaan negara, penerimaan pajak juga diandalkan sebagai sumber pendanaan utama dalam mendanai total belanja Negara sehingga pajak juga memiliki peran strategis terhadap kegiatan pengeluaran pemerintah. Permasalahan terkait target penerimaan pajak yang tidak tercapai kerap terjadi tiap tahunnya. Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi penerimaan pajak, produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh dinamika produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi kondisi perkembangan penerimaan pajak, produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara di Indonesia; 2. Menganalisis pengaruh produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, serta belanja negara terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan (ECM) untuk menganalisis perbedaan efek jangka panjang dan jangka pendek pada model penerimaan pajak. Salah satu variabel ekonomi makro yang dapat mempengaruhi fluktuasi penerimaan pajak adalah variabel pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak melalui nilai riil dari dasar pengenaan pajak dan pola konsumsi individu (Karran, 1985). Jika pertumbuhan ekonomi suatu Negara meningkat, nilai riil dari dasar pengenaan pajak juga akan meningkat. Peningkatan nilai riil dari dasar pengenaan pajak akan menyebabkan pajak yang ditarik dari objek pajak tersebut meningkat, sehingga penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah juga akan meningkat. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga memiliki efek yang signifikan terhadap perubahan pola konsumsi individu. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, pendapatan atau upah individu juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut

dapat membuat pola konsumsi individu terhadap suatu barang berubah, dan kemudian dapat meningkatkan penarikan pajak jenis tertentu. Parkin (2008) menjelaskan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tergantung pada tarif pajak dan pendapatan. Pendapatan tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan PDB riil sehingga besarnya penerimaan pajak juga tergantung pada PDB riil (Parkin, 2008). Ketika PDB riil mengalami peningkatan pada saat ekspansi, upah dan keuntungan juga akan meningkat, sehingga penerimaan pajak juga akan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, penurunan PDB riil pada saat depresi akan menyebabkan upah dan keuntungan menurun. Sama halnya dengan Pengaruh Belanja Negara terhadap Penerimaan Pajak. Sebagai komponen utama kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausal antara satu dengan yang lainnya. Arah hubungan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi perdebatan dalam teori ekonomi publik. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hubungan kausal antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah terdapat empat hipotesis umum yang biasa digunakan, yaitu hipotesis penerimaan pajak-pengeluaran (*tax-spend hypothesis*), hipotesis sinkronisasi fiskal (*synchronization fiscal hypothesis*), hipotesis pemisahan kelembagaan (*institutional separation hypothesis*), serta hipotesis pengeluaran/penerimaan pajak (*spend-tax hypothesis*). Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Produk domestik bruto riil berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak;
2. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak;
3. Overvaluasi nilai tukar rupiah terhadap USD menyebabkan penurunan penerimaan pajak. atau dapat pula dikatakan nilai tukar rupiah terhadap USD memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (asumsi: dalam kondisi neraca pembayaran mengalami surplus);
4. Belanja negara berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Pada penelitian ini digunakan analisis model regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan penelitian ini digunakan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model/ECM*) untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan belanja negara, sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada estimasi model jangka pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (*Error Correction Term/ECT*) sebesar 0,221 yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian penerimaan pajak yang terjadi pada jangka panjang akan dikoreksi sebesar 22 persen

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Deger (1995)	<i>Military Expenditure And Developing Countries</i>	Metode <i>The externality</i> menggunakan ekonomi dua sektor, yaitu Q keluaran sipil dan keluaran militer M.	Hasil daripada penelitian ini adalah pertahanan dan pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan pada keamanan dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perlu menempatkan model teoritis dalam konteks pembangunan sosial ekonomi yang lebih luas dimana keamanan, selain pertumbuhan, juga menambah kesejahteraan sosial.	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah OLS

2.	Yakolev (2007)	<i>Arms Trade, Military Spending, and Economic Growth.</i>	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik estimasi <i>fixed effect model (FEM)</i> , <i>random effect model (REM)</i> , serta <i>Arellano-Bond GMM</i> dengan lokus penelitian di 28 negara. Jenis data panel dengan variable pengeluaran militer, perdagangan senjata serta pertumbuhan ekonomi di 28 negara yang diteliti selama tahun 1965 – 2000	hasil regresi Sollow-style, pengeluaran militer memiliki hubungan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor senjata memiliki hubungan yang negative terhadap pertumbuhan ekonomi.	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah OLS
3.	Lojanica (2015)	<i>Government Expenditure and</i>	Dua tes tradisional diterapkan untuk memeriksa apakah deret	Hasil pengujian ADF dan KPSS menunjukkan bahwa penerimaan negara dan belanja pemerintah	Locus dari penelitian ini dilakukan di

		<p><i>Government Revenue – The Causality on the Example of the Republic of Serbia</i></p>	<p>waktu stasioner atau tidak yaitu Tes Augmented Dickey Fuller (ADF) (Dickey dan Fuller 1981) dan KPSS test. Untuk menjalankan karakteristik yang melekat pada deret waktu, kriteria informasi Akaike/<i>Akaike information criterion</i> (AIC) digunakan untuk menentukan ukuran deret lag. Model koreksi kesalahan tak terbatas (UECM), yang ditentukan oleh model ini, mengintegrasikan dinamika jangka pendek dan jangka panjang tanpa kehilangan informasi seiring waktu.</p>	<p>tidak berada dalam urutan integrasi I (2) yang memenuhi persyaratan dasar penerapan model ARDL. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi antar variabel.</p>	<p>Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 –2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah OLS</p>
--	--	---	---	---	--

			Memodelkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah, menggunakan teknik ARDL.		
4.	Dogan dan Cheong (2006)	Pengeluaran Pemerintah dan Pendapatan Nasional: Uji Kausalitas Untuk Lima Negara Asia Tenggara (<i>Government Expenditure And National Income:</i>	Peneliti menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Granger untuk menguji dua hipotesis. Hipotesis pertama yang diuji adalah bahwa pengeluaran pemerintah bersifat endogen, hasil dari pertumbuhan pendapatan nasional (biasanya dikenal sebagai hukum Wagner). Hipotesis kedua adalah	tidak ada hubungan kausalitas, satu arah atau dua arah, antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional (kecuali untuk Filipina dimana kebalikan dari hipotesis Wagner didukung) mungkin karena kekurangan data dan masalah metodologis. Misalnya, mungkin ada bias yang ditimbulkan dengan menggunakan data pengeluaran pemerintah agregat. Ada kemungkinan bahwa komponen pengeluaran yang	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah OLS

		<i>Causality Tests For Five South East Asian Countries).</i>	<p>pengeluaran pemerintah merupakan faktor eksogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.</p> <p>Peneliti menggunakan metode kointegrasi Johansen-Juselius untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional per kapita riil dan pengeluaran pemerintah per kapita riil di semua negara sampel</p>	<p>berbeda mempengaruhi pendapatan riil dengan cara yang berbeda, tetapi ketika data pengeluaran agregat digunakan, efek ini mungkin sulit untuk dideteksi</p>	dengan data time series.
5.	Kollias, Manolas, dan Paleologou (2004)	<i>Defence expenditure and economic growth in the</i>	Menguji bagaimana hubungan antar pengeluaran militer dan pertumbuhan ekonomi dengan locus penelitian kepada anggota EU 15	hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 15 negara anggota European Union menunjukkan jika tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran militer terhadap	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010

		<i>European Union A causality analysis</i>	menggunakan cointegration dan uji kausalitas pada periode 1961 – 2000.	pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, terdapat bukti empiris jika hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, yang dapat dibuktikan dengan adanya fakta jika dalam pembuatan anggaran pengeluaran militer di negara-negara <i>European Union</i> berdasarkan kepada kondisi perekonomian di negara tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan jika tidak terdapat <i>bidirectional causality</i> di 5 negara <i>European Union</i> .	– 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah OLS dengan data time series.
6.	Amalia Wijayanti (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Indonesia:	Analisis model regresi linear berganda (<i>Multiple Regression Analysis</i>) dengan metode kuadrat	Penerimaan pajak Indonesia dipengaruhi oleh variabel PDB, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan belanja negara,	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan

		<p>Pendekatan Ekonomi Makro</p>	<p>terkecil atau <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat dan penelitian ini digunakan model koreksi kesalahan (<i>Error Correction Model/ECM</i>) untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek</p>	<p>sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia dalam model jangka panjang. Pada model jangka pendek penerimaan pajak Indonesia hanya dipengaruhi oleh belanja negara, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Indonesia. Pada estimasi model jangka pendek juga diperoleh nilai koefisien bentuk koreksi kesalahan (<i>Error Correction Term/ECT</i>) sebesar 0,221 yang menunjukkan bahwa ketidak-sesuaian penerimaan pajak yang terjadi pada jangka panjang</p>	<p>periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah hanya dengan menggunakan metode OLS dengan data time series.</p>
--	--	---	--	--	---

5.	Dogan, 2006	<i>Government Expenditure And National Income : Causality Tests For Five South East Asian Countries</i>	Metode kointegrasi Johansen-Juselius untuk mendeteksi hubungan jangka panjang antara pendapatan nasional per kapita riil dan pengeluaran pemerintah per kapita riil di semua negara sampel, dan metodologi yang dikembangkan oleh Granger untuk menguji dua hipotesis.	terdapat tren peningkatan dalam PDB per kapita riil (Y) dan pengeluaran Pemerintah per kapita riil (G) untuk kelima negara dan hubungan positif antara kedua variabel. Tidak ada hubungan kausalitas, satu arah atau dua arah, antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan nasional (kecuali untuk Filipina dimana kebalikan dari hipotesis Wagner didukung). Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hukum Wagner tidak didukung oleh data dari lima negara dalam sampel. Ini berarti tidak ada hubungan sebab akibat dari pendapatan per kapita riil ke pengeluaran pemerintah per	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 –2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah hanya dengan menggunakan metode OLS dengan data time series.
----	-------------	---	--	---	--

				kapita riil. Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa hipotesis terbalik hanya didukung oleh data Filipina, yang menunjukkan bahwa arah kausalitas adalah dari pengeluaran pemerintah hingga pendapatan nasional.	
6.	Pieroni (2007)	<i>Military Expenditure and Economic Growth</i>	Pendekatan non-parametrik dapat memeriksa kekuatan estimasi parametrik model	Beban belanja militer memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan. Dampak pengeluaran terhadap pertumbuhan porsi pengeluaran pemerintah sipil diperkirakan negatif dan mewakili potensi pemerintah untuk menggunakan sumber daya untuk memberlakukan kebijakan sektor publik yang secara ekonomi tidak produktif. Estimasi pola	Locus dari penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini

				nonparametrik menunjukkan bahwa pengaruh nonlinier dalam hubungan antara beban militer dan pertumbuhan sering terjadi di negara-negara dengan beban militer yang tinggi. Dampak yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan kuadrat pengeluaran militer ketika variabel ini digunakan sebagai proxy untuk bentuk-bentuk alternatif hubungan nonlinier. Negara-negara dengan beban militer yang lebih rendah menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara beban militer dan pertumbuhan dengan estimasi nonparametrik yang mendekati analisis parametrik.	adalah hanya dengan menggunakan metode OLS dengan data time series.
7.	Avatara (2013)	Faktor-Faktor	Pengujian hipotesis	Hasil analisis data menunjukkan	Locus dari

		<p>Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1992 - 2011 (Kajian Dari Sisi Fiskal)</p>	<p>dilakukan dengan metode Analisis Regresi Linier Berganda (<i>Ordinary Least Square</i>). Untuk melihat pengaruh Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal, dan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia dengan uji t dan uji F</p>	<p>bahwa Penerimaan Perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011 di kaji dari sisi fiskal. Secara parsial, Penerimaan perpajakan, Utang Pemerintah Indonesia, Belanja Modal dan Kebijakan Otonomi Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia tahun 1992 – 2011. Secara parsial, variable Penerimaan Perpajakan (T), Utang Pemerintah Indonesia (UPI), Belanja Modal (BM) dan Kebijakan Otonomi Daerah (DUM)</p>	<p>penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan periode penelitian sejak tahun 2010 – 2020. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian pada penelitian ini adalah hanya dengan menggunakan metode OLS dengan data time series.</p>
--	--	---	--	--	--

				<p>berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (PDB).</p> <p>Penerimaan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), Utang pemerintah Indonesia (UPI) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB), pengaruh variabel Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan.</p>	
8.	Suyono (2014)	<i>The Relationship between Tax Revenue and Economic Growth of</i>	<p>Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Desain penelitian ini adalah penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk memverifikasi hipotesis</p>		

		<i>Hebei Province Based on The Tax Multiplier Effect</i>	<p>pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu non-random sampling dan menggunakan spesifik. Untuk tahap metode untuk mengoreksi rumus pengganda pajak sederhana. Salah satunya adalah metode derivasi matematika dan yang lainnya adalah metode derivasi teoritis.</p>		
--	--	--	---	--	--

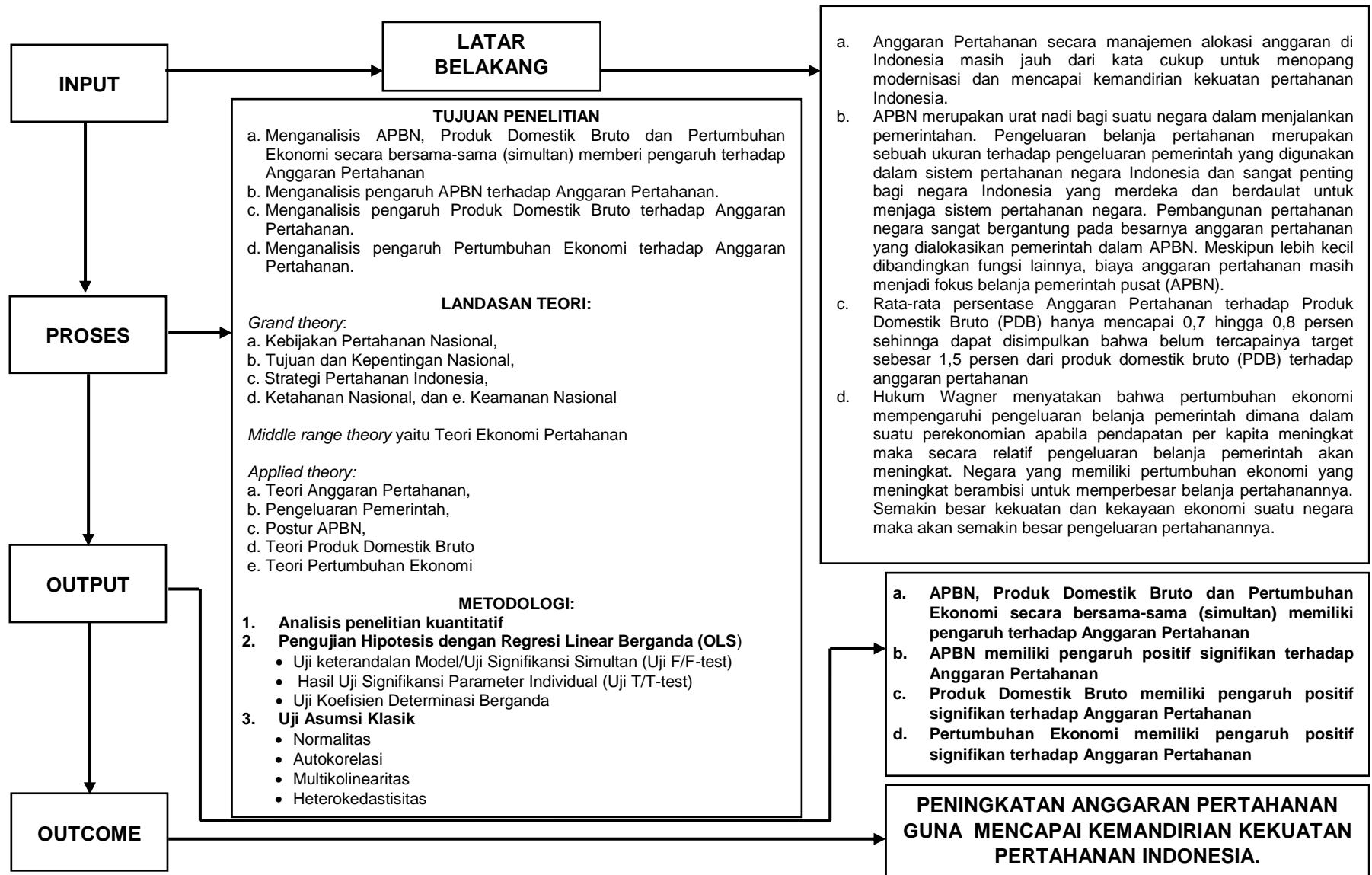
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pikir penelitian merupakan penggambaran atas lingkup penelitian yang menunjukkan keterkaitan antar setiap tahapan penelitian. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dengan menjelaskan keterkaitan antar variabel yang diteliti didukung oleh teori-teori. Kerangka pemikiran ini merupakan acuan dan argumentasi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian. Sejalan dengan tujuan dan kajian teori yang telah dipaparkan, maka selanjutnya akan diilustrasikan dalam kerangka konseptual mengenai pengaruh APBN, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Pertahanan T.A 2010-2020. Adapun tahapan yang dimaksud dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu bagian *input, process, output, dan outcome*.

Tahap *input* menjelaskan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu terkait permasalahan yang saat ini sedang dihadapi yaitu : a. Anggaran Pertahanan secara manajemen alokasi anggaran di Indonesia masih jauh dari kata cukup untuk menopang modernisasi dan mencapai kemandirian kekuatan pertahanan Indonesia; b. APBN merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran belanja pertahanan merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam sistem pertahanan negara Indonesia dan sangat penting bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk menjaga sistem pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah dalam APBN. Meskipun lebih kecil dibandingkan fungsi lainnya, biaya anggaran pertahanan masih menjadi fokus belanja pemerintah pusat (APBN); c. Rata-rata persentase Anggaran Pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 0,7 hingga 0,8 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya target sebesar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) terhadap anggaran pertahanan dan; d. Hukum Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi

pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya. Semakin besar kekuatan dan kekayaan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya.

Tahap proses (*process*) merupakan tahap yang berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data penelitian. Tahap selanjutnya menjelaskan mengenai *output* penelitian, yang dalam konteks penelitian ini berupa APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap Anggaran Pertahanan; APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia; PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Pertahanan di Indonesia dan; Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Anggaran Pertahanan di Indonesia. Tahap terakhir, yaitu *outcome* menjelaskan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian, dimana dalam penelitian ini hasil yang dicapai adalah peningkatan Anggaran Pertahanan guna mencapai kemandirian kekuatan pertahanan Indonesia.



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

2.4 MODEL ANALISIS PENELITIAN

Model analisis digunakan untuk penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik dalam analisis datanya, baik menggunakan variabel terukur maupun variabel laten. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian pada poin sebelumnya, maka model analisis pada penelitian ini adalah:

Judul:

PENGARUH APBN, PRODUK DOMESTIK BRUTO
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP ANGGARAN
PERTAHANAN T.A 2010-2020

<i>Independent Variabels</i>	<i>Dependent Variabels</i>	<i>Measurement</i>
<p>H₁ JUMLAH APBN</p> <p>H₂ PRODUK DOMESTIK BRUTO</p> <p>H₃ PERTUMBUHAN EKONOMI</p>	<p>ANGGARAN BELANJA PERTAHANAN Y</p>	<p>Statistik Deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi data masing-masing variabel • Ukuran Sentral: Mean Median dan Modus • Penyajian data: Grafik dan tabel <p>Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda (OLS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji keterandalan Model/Uji Signifikansi Simultan (Uji F/F-test) • Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T/T-test) • Uji Koefisien Determinasi Berganda <p>Uji Asumsi Klasik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normalitas • Autokorelasi • Multikolinearitas • Heterokedastisitas

2.5 HIPOTESIS

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H1 : APBN (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia
- H2 : PDB (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia
- H3 : Pertumbuhan Ekonomi (X3) di Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap anggaran pertahanan di Indonesia

Model Analisis penelitian kuantitatif ini menggunakan regresi linear berganda merupakan metode yang menganalisis pengaruh antara dua variabel atau lebih khusus variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat antara variabel dependen dan variabel independent (Sugiyono, 2011). Untuk mencapai tujuan dan menguji hipotesis dalam penelitian ini maka variabel yang mempengaruhi anggaran pertahanan adalah APBN, PDB, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2020.

Adapun rumus yang dipakai dalam analisis regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

Adapun persamaan yang dapat dibuat yaitu:

$$t = f(APBN + PDB + PERTUMBUHAN EKONOMI)$$

Kemudian model di tersebut ditransformasikan ke dalam sebuah model ekonometrika menjadi :

$$\log Y_t = \beta_0 + \beta_1 APBN_t + \beta_2 PDB + \beta_3 PERTUMBUHAN EKONOMI + e$$

Keterangan :

- Y = Anggaran Pertahanan di Indonesia
- APBN = Jumlah total keseluruhan APBN di Indonesia
- PDB = Produk Domestik Bruto di Indonesia
- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- e = error (gangguan)